

**PENGARUH IC DAN SOP TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DENGAN
PENALARAN ETIS SEBAGAI VARIABEL MODERATING**
(Studi Empiris Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan

Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

OLEH:

DEWI PUSPITARANI

10800113120

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Puspitarani

NIM : 10800113120

Tempat/Tgl. Lahir : Serang, 03 Januari 1994

Jurusan/prodi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Samata

Judul : Pengaruh IC dan SOP Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Penalaran Etis Sebagai Variabel Moderating.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, Februari 2019

Penyusun,

Dewi Puspitarani
10800113120



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong – Gowa. ☎ 424835, Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **“Pengaruh IC dan SOP Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Penalaran Etis Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)”**, yang disusun oleh **Dewi Puspitarani**, NIM: 10800113120, Mahasiswi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2019, bertepatan dengan 14 Rajab 1440 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, 21 Maret 2019

14 Rajab 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Munaqisy I	: Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si.Ak
Munaqisy II	: Muh. Akil Rahman, SE., ME
Pembimbing I	: Jamaluddin M, SE., M.Si.
Pembimbing II	: Sumarlin, SE., M.Ak.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi yang memberi citra kepada manusia tentang bagaimana dan cara beretika sesuai tuntunan wahyu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **“Pengaruh IC dan SOP Terhadap Kecurangan Dengan Penalaran Etis Sebagai Variabel Moderating”**.

Skripsi ini dapat tersusun atas bantuan dan berbagai pihak, yang telah dengan baik hati bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi serta senantiasa memberikan semangat sehingga konsistensi selalu terjaga selama pengerjaan Skripsi ini. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayah: Mustapa Nurung dan ibu: Maryani, Kakak tercinta Ika Mustikasari dan Rifqi Handrian, serta Adik terkasih Indah Maulidya atas bantuan dan dukungannya baik berupa moril ataupun materil dan

senantiasa memberikan cinta, kasih, motivasi, serta do'a restu kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Jamaluddin M., SE., M.Si selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
6. Bapak Sumarlin, SE., M. Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini..
7. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Akuntansi atas segala jerih payahnya membimbing dan memberi motivasi dan bekal ilmu kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah administrasi perkuliahan.

9. Sahabat-sahabatku tersayang, Agustina, Salmianna, Winda Winarda, Istiqamah, Nilawati, Halimah Achmad Makin dan Mayki Ayu Julietasri yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Muhammad Aburizal Bakri yang telah menemani penulis dan memberikan dukungan dan motivasi dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
11. Rekan-rekan dari Jurusan Akuntansi angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan, semangat serta doanya kepada penulis.
12. Rekan-rekan dari kelas Akuntansi C angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan, semangat serta doanya kepada penulis.
13. Rekan-rekan KKN Angkatan 54 Kecamatan Eremerasa , terkhusus untuk Posko 9 Desa Parangloe.
14. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi atas segala dukungan, bantuan, dan motivasinya kepada penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi tolak ukur guna perbaikan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan rekan-rekan mahasiswa serta pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan

Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Gowa, Februari 2019

Dewi Puspitarani

10800113120



DAFTAR ISI

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR ,	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-20
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Hipotesis	9
D. Definisi Operasional	14
E. Penelitian Terdahulu	18
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TEORETIS	21-50
A. Agency Theory.....	21
B. Teori <i>Gone</i>	22
C. <i>Internal Control</i>	25
D. <i>Standard Operating Procedure</i>	32
E. Penalaran Etis	35
F. <i>Kecurangan (Fraud)</i>	38
G. Pengadaan Barang dan Jasa	42
H. Rerangka Teoritis.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51-61
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Populasi dan Sampel	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data	53

F. Instrumen Penelitian	54
G. Metode Analisis Data	55
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 62-105
A. Gambaran Umum Data Penelitian	62
B. Analisis Hasil Penelitian	70
A. Hasil Uji Kualitas Data	73
B. Hasil Uji Asumsi Klasik	73
C. Hasil Uji Hipotesis	77
D. Analisis Deskriptif	90
E. Pembahasan Penelitian	97
 BAB V PENUTUP	 106-108
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
C. Keterbatasan Penelitian	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	115
RIWAYAT HIDUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Pengukuran <i>Internal Control</i>	14
Tabel 1.2	Indikator Pengukuran SOP	15
Tabel 1.3	Indikator Pengukuran Penalaran Etis	16
Tabel 1.4	Indikator Pengukuran Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa	17
Tabel 1.5	Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1	Skala Likert	54
Tabel 4.1	Uji Validitas	71
Tabel 4.2	Uji Reliabilitas	72
Tabel 4.3	Uji Normalitas	74
Tabel 4.4	Uji Multikolinearitas	75
Tabel 4.5	Uji Heterokedastisitas	76
Tabel 4.6	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	77
Tabel 4.7	Uji F – Uji Simultan	78
Tabel 4.8	Uji T – Uji Parsial	78
Tabel 4.9	Kriteria Penentu Variabel Moderating	82
Tabel 4.10	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	82
Tabel 4.11	Uji F – Uji Simultan	83
Tabel 4.12	Uji T – Uji Parsial	84
Tabel 4.13	Stastistik Deskreptif variabel	90
Tabel 4.14	Deskripsi Item Pernyataan Variabel <i>Internal Control</i>	92
Tabel 4.15	Deskripsi Item Pernyataan Variabel <i>SOP</i>	93

Tabel 4.16 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Penalaran Etis	95
Tabel 4.17 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pencegahan <i>Fraud</i>	96
Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Teoritis	50
Gambar 4.1 Logo UIN Alauddin	69



ABSTRAK

Nama : Dewi Puspitarani
Nim : 10800113120
Judul : Pengaruh IC dan SOP terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Penalaran Etis sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *internal control* dan penerapan *standard operating procedure* terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa dengan penalaran etis sebagai variabel moderating pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dari unit kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang secara struktural menjadi obyek pengendalian internal. Sampel yang diambil adalah unit kerja Universitas Islam Negeri Alauddin yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa dan para *Stakeholder* dengan jumlah responden sebanyak 32 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang terdiri dari 5 instrumen dengan menggunakan skala likert. Uji kualitas data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Analisis regresi linier berganda untuk hipotesis *internal control* dan penerapan *standard operating procedure*. Analisis regresi linier berganda dengan uji nilai selisih mutlak untuk hipotesis *internal control* dan penerapan *standard operating procedure* yang dimoderasi oleh penalaran etis.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa *internal control* dan penerapan SOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa,. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa penalaran etis mampu memoderasi *internal control* dan penerapan *Standard Operating Procedure* terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci : *Internal Control, SOP, Pengadaan barang dan jasa, Penalaran etis..*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mulai melakukan perubahan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara yang berawal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada masa orde baru yang terus berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Kesempatan untuk melakukan korupsi pada masa tersebut telah menggerogoti keuangan negara dan menyebabkan runtuhnya perekonomian negara. Sejak runtuhnya masa orde baru tersebut, pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Reformasi pengelolaan keuangan negara terwujud dalam Undang-Undang (UU) No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU tersebut yang menjadi dasar reformasi pengelolaan keuangan negara (Saptapradipta,2015).

Berdasarkan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat, dalam pengelolaan keuangannya harus bersifat fleksibel dan berprinsip efisiensi, ekonomis dan efektif sesuai dengan UU No.17 tahun 2003. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). BLU

dibentuk dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Perguruan Tinggi merupakan salah satu instansi pemerintah yang statusnya diubah menjadi BLU. Triani dkk (2014) menyebutkan, dalam perkembangan dari tahun 2009 sampai sekarang telah banyak institusi perguruan tinggi yang berstatus PTN biasa berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, ada perguruan tinggi yang berstatus PTNBH diubah menjadi BLU. Data dan fakta Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan mempresentasikan bagian terbesar dari seluruh Satuan Kerja (Satker) BLU yaitu 51 persen. Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang penetapan UIN sebagai Badan Layanan Umum, maka SPI merupakan salah satu unsur Pengendali dan Pengawasan intern Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (Pustipad UIN alauddin).

Namun munculnya BLU sejak tahun 2007 dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61/2007 sampai dengan saat ini masih menimbulkan beberapa masalah. Masih banyak tindak kecurangan yang dilakukan oleh instansi yang berstatus BLU tidak terkecuali pada perguruan tinggi. Penyelewengan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berstatus BLU salah satunya terjadi di Universitas

Jendral Soedirman (Unsoed). Rektor Unsoed ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan korupsi terhadap dana BLU. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, total kerugian negara dalam proyek kerja sama senilai Rp 5,8 miliar tersebut sekitar Rp 2,154 miliar (Saptapradipta,2015).

Kasus *fraud* yang marak ini terjadi di berbagai bidang, seperti dari hasil laporan tahunan KPK berdasarkan pengaduan masyarakat, dapat terlihat bahwa masih banyak perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan (wewenang) yang dapat merugikan keuangan negara hingga mencapai 3.108 (tiga ribu seratus delapan) kasus. Salah satu contoh yang berpotensi merugikan negara adalah proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa dalam pengadaan barang/jasa rawan terhadap tindakan *fraud* (kecurangan). Seperti yang dikatakan oleh Tuankotta (2007) bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik.

Kasus *fraud* pengadaan barang jasa ini banyak terjadi seiring dengan temuan dari BPK maupun KPK yang melaporkan bahwa instansi terkait baik pemerintahan ataupun swasta melakukan tindakan korupsi dengan berbagai cara. Menurut bapak Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo “Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK maupun KPK melaporkan adanya kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tetapi tidak banyak yang masuk ke pengadilan. Beberapa kasus pengadaan yang berhasil

diselesaikan di pengadilan justru mementahkan legenda bahwa markup ‘hanya’ 30%” (Nurharjanti, 2013)

Laporan tahunan KPK tahun 2015 dalam akbar (2017) mencantumkan bahwa 41 dari 106 perkara yang disidik oleh KPK pada tahun 2015 merupakan pengadaan barang dan jasa. Banyaknya praktek *fraud* pengadaan barang/jasa yang terjadi tersebut tentunya dikarenakan kurang patuhnya pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa terhadap peraturan pemerintah terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Hasil penelitian Indonesia Corouption Watch pada 2016 menemukan 12 pola kasus korupsi di Perguruan Tinggi. Dari 12 pola yang ditemukan, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi modus yang paling banyak digunakan. Tercatat 14 kasus dari 37 kasus yang ditemukan menggunakan modus pengadaan barang dan jasa. Dalam berita Nasional Kompas 2 Maret 2017, disebutkan bahwa Universitas Udayana Bali sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri-BLU tersandung dugaan korupsi pada pengadaan alat kesehatan pada tahun 2009-2010. Tindakan korupsi sebagai salah satu bentuk kecurangan akuntansi (*fraud*) yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi negeri disebabkan oleh belum efektifnya pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintahan Indonesia (Merawati dan Mahaputra, 2017).

Di Universitas Islam Negeri Alauddin sendiri pernah terjadi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan bendahara Fakultas Sains dan

Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Seperti yang dikabarkan oleh kompas.com, setelah sempat buron, mantan bendahara Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sofyan (40) akhirnya berhasil ditangkap oleh Tim Satuan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar) pada jum'at 14 Oktober 2016 (Cipto, 2016). Lebih lanjut Cipto (2016) menjelaskan bahwa tersangka diduga telah melakukan pemotongan anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan lembaga mahasiswa dan pengadaan kantor serta biaya transportasi. Namun yang bersangkutan tidak menyalurkan dana tersebut. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal 8 dan 9 Undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersangka diduga telah menggunakan dana kemahasiswaan untuk kepentingan pribadi. Modus yang digunakan dengan memotong dana yang diperuntukkan untuk kegiatan lembaga mahasiswa dan pengadaan perlengkapan kantor. Bahkan tersangka juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seakan-akan dana sudah sesuai peruntukannya, sehingga negara dirugikan hingga Rp 200 Juta.

Perguruan tinggi merupakan entitas ekonomi pengelola dana yang bersumber dari perorangan, dana masyarakat atau pemerintah oleh karenanya perguruan tinggi memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala atas pengelolaan sumber dana tersebut kepada *stakeholder* (Yuniarti dan Apandi, 2012). Oleh karena itu, seharusnya perguruan tinggi mampu untuk mempertahankan kredibilitasnya dalam menjaga harta kekayaan instansinya demi menjaga kepercayaan masyarakat dan para

stakeholder baik dalam internal maupun eksternal perguruan tinggi. Prinsip-prinsip tata kelola transparansi, akuntabel, tanggungjawab, efisiensi, adil dan *reward-punishment* sudah merupakan suatu keharusan untuk ditegakkan di perguruan tinggi (Astina, 2011). Namun, jika dilihat dari beberapa temuan *fraud* di Perguruan tinggi, maka dapat diindikasikan bahwa telah terjadi kegagalan dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan yang memberikan konsekuensi sangat merugikan bagi organisasi.

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia (agusyani, 2016). Kecurangan atau yang sering disebut *fraud* merupakan suatu tindakan yang bisa terjadi ketika lingkungan ditempat mereka bekerja mempunyai integritas rendah, kontrol rendah dan tekanan tinggi (Nurharjanti, 2013). Salah satu penyebab adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan akuntansi adalah lemahnya elemen pengendalian internal. Pengendalian disini menjadi penting dikarenakan dengan adanya pengendalian didalam perusahaan (*internal control*) maka kecenderungan melakukan kecurangan dapat diminimalisasi. Wilopo (2006) dalam Dewi (2016) menemukan bahwa internal birokrasi memberikan pengaruh terhadap kecurangan akuntansi pemerintahan. Jadi, semakin baik pengendalian internal birokrasi, maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi pemerintah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernandez dan Groot (2007) yang menemukan

bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi

Pemerintah telah berusaha mengeluarkan beberapa peraturan untuk memperketat proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak terjadi kebocoran lagi (Akbar, 2017). Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diatur dalam peraturan pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian *intern*, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun pengendalian. Perancangan pengendalian internal di setiap lingkungan instansi pemerintah diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan, pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud (Harwida, 2013).

Selain pengendalian internal, faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa adalah ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa itu sendiri. Sistem ini bersifat proaktif yaitu berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Hasil penelitian Thai (2001) dalam Jatiningtyas (2011) secara konseptual menunjukkan bahwa ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Ardi (2008) menunjukkan bahwa pengaruh prosedur atau SOP tidak signifikan pada pengendalian pengadaan

barang/jasa pada pemerintah kota Surabaya, hal ini disebabkan karena panitia belum memahami pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan dan ujian sertifikasi yang ada, prosedur yang berlaku, sosialisasi, dan kajian mengenai proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Beberapa pihak menilai bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal, kolusi dengan pihak luar dan praktik yang tidak beretika (Salin et al, 2012 dalam Mukhibad, 2014). Banyaknya praktek *fraud* pengadaan barang/jasa yang terjadi juga bias disebabkan kurang patuhnya pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa terhadap peraturan pemerintah terkait dengan pengadaan barang/jasa. Diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mencegah terjadinya *fraud*. Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah unsur perilaku etik. Menurut Baucus (1994) dalam Puspasari (2012) secara umum perilaku illegal adalah bagian dari perilaku tidak etis, oleh karena itu ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakkan standar moral. Penelitian dilakukan oleh Merawati dan Mahaputra (2017) yang menguji pengaruh moralitas, pengendalian internal, dan gender dalam kecenderungan terjadinya *fraud* pada konteks Perguruan Tinggi. Penelitian dengan desain eksperimen tersebut menemukan adanya perbedaan kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi yang disebabkan oleh level moralitas, pengendalian internal, dan gender pada Perguruan Tinggi.

Dalam menjalankan profesinya, akuntan profesional banyak berinteraksi dengan pihak-pihak berkepentingan baik individual, entitas dan organisasi. Dalam banyak

kasus, interaksi tersebut merupakan salah satu faktor potensial penyebab adanya konflik dalam profesi akuntansi. Oleh karena itu etika perilaku dari akuntan profesional sangat penting dalam hubungannya terhadap status dan kredibilitas dari profesi akuntansi. Kasus-kasus pelanggaran etika dapat dicegah apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Ludigdo, 1999b) dalam Marwanto (2007). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh IC Dan SOP Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Penalaran Etis Sebagai Variabel Moderating”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *internal control* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa?
2. Apakah penerapan SOP berpengaruh terhadap pencegahann kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa?
3. Apakah *Internal Control* yang dimoderasi penalaran etis berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa ketika penalaran etika meningkat?

4. Apakah penerapan SOP yang dimoderasi penalaran etis berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa ketika penalaran etika meningkat?

C. Hipotesis

1. *Internal control* terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa

Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan, 2009 dalam Hermiyetti 2010). Menurut Tuankotta (2007) dalam Hermiyetti (2010) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti R dan Apandi (2012) mengenai gejala *fraud* dan peran internal auditor dalam pendeteksian *fraud* di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan anomali akuntansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesisnya adalah:

H₁: *Internal control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

2. Penerapan *Standard Operating Procedure* Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa

SOP adalah gambaran langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas agar tujuan instansi pemerintah tercapai. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen berisi tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan standar yang sudah baku. SOP berlandaskan pada sistem manajemen kualitas (*Quality Management System*), yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu.

Faktor yang ikut menentukan jalannya sistem pengadaan barang/jasa adalah ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa itu sendiri. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Hasil penelitian Thai (2001) dalam Jatiningtyas (2011) menyatakan bahwa ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat ditarik hipotesis:

H₂: *Standard Operational Procedure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

3. Penalaran Etis memoderasi *internal control* terhadap pencegahan kecurangan barang/jasa.

Pengendalian *intern* merupakan sistem dan alat yang dirancang sedemikian rupa oleh manajemen untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai berjalan dengan maksimal dan menghindari adanya kemungkinan penyelewengan maupun penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai (Asy'ari, 2013). Suatu sistem tidak dapat berfungsi dengan baik bila orang yang harus menjalankannya tidak memenuhi syarat (Tunggal. 1995:20). Lebih lanjut Tunggal (1995: 21) menyatakan bahwa pihak pimpinan dan karyawan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas pengendalian intern. Pengendalian intern akan efektif jika orang-orang yang menjalankannya memenuhi syarat baik secara kemampuan ataupun dari segi moralnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Liyanarachi (2009) menunjukkan bahwa moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *post-konvensional*), semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu, semakin ia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Liyanarachi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan

mempengaruhi perilaku etis mereka. Dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Dengan demikian, pengendalian internal yang dijalankan oleh individu dengan penalaran etis yang baik akan berjalan lebih efektif.

Sehingga dapat ditarik Hipotesis:

H₃: Penalaran etis memoderasi hubungan antara *internal control* terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa.

4. Penalaran Etis memoderasi penerapan *Standard Opeartional Procedure* terhadap pencegahan kecurangan barang/jasa

SOP berfungsi membentuk sistem kerja & aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis; dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Dimensi etikanya terletak pada kekuatan hukum dan regulasi yang membantu mengorganisir tanggung jawab dengan segala sanksi atau imbalannya (Haryatmoko, 2011). Haryatmoko (2011) lebih lanjut menjelaskan ketika konflik kepentingan merayap masuk, pejabat publik atau rekanan

swasta dengan mudah masih bisa menemukan kelemahan-kelemahan dari standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk itu individu yang menjalankan harus memiliki penalaran etis yang baik untuk menghadapi dilema etik seperti ini serta untuk menentukan tindakan etisnya. Beberapa penelitian yang menguji pengaruh faktor individual seperti penalaran moral dan *locus of control* terhadap perilaku etis seseorang dilakukan oleh Trevino (1986), Tsui dan Ferdinand (1996), dan Rotter (1996) dalam Rafinda (2013). Beberapa penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penalaran moral dan *locus of control* dari seseorang akan memengaruhi mereka dalam berperilaku etis. Pertimbangan etis seseorang ketika menghadapi dilema etika adalah proses yang komprehensif dan rumit (Pramita, 2014).

.Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4 : Etika memoderasi hubungan antara penerapan SOP terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa

D. Definisi Operasional

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu:

1) *Internal Control*

Pengendalian *intern* merupakan sistem dan alat yang dirancang sedemikian rupa oleh manajemen untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai berjalan dengan maksimal dan menghindari adanya kemungkinan penyelewengan maupun penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai (Asy'ari, 2013). Pengendalian intern diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat pada dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relative dari pengendalian internal (Dewitasari, 2009)

Tabel 1.1
Indikator pengukuran *Internal Control* (X1)

No.	Indikator Pengukur
1	Lingkungan Pengendalian
2	Penilaian resiko
3	Aktivitas pengendalian
4	Informasi dan Komunikasi
5	Pemantauan (<i>monitoring</i>)
Sumber : Amelia,, Desmiyawati dan Nur Azlina (2013)	

2) *Standard Operasional Procedure*

SOP (*Standard Operasional Procedure*) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada didalam suatu organisasi

yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan, langkah atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemroses yang dilaksanakan oleh orang-orang didalam suatu organisasi agar berjalan efektif, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013).

Tabel 1.2
Indikator pengukuran SOP (X2)

No.	Indikator Pengukur
1	Kemudahan dan kejelasan
2	Efisiensi dan efektivitas
3	Dinamis
4	Kepatuhan hukum
5	Kepastian hukum.
Sumber : Tanjung dan Subagjo, (2012)	

2. Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang memengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah penalaran etis

3) *Penalaran etis*

Penalaran etis adalah penggunaan beberapa pemikiran dalam menilai sebuah kegiatan bisnis sebagai etika atau bukan. Kebutuhan mengidentifikasi dan mengukur faktor individual dan interaksi antara faktor situasional dan individual dalam memprediksi perilaku etis menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua faktor

tersebut memengaruhi individu dalam melakukan kecurangan (Kisamoreet al., 2007 dalam Pramita 2014). Faktor individual menjadi penting untuk dipertimbangkan karena proses pengambilan keputusan seseorang tidak dapat dilihat secara parsial hanya dari faktor situasional saja, melainkan juga harus mempertimbangkan faktor yang melekat pada individu yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil (Rafinda, 2013).

Tabel 1.3
Indikator Penalaran Etis (M1)

No.	Indikator Pengukur
1	<i>Deontological</i>
2	<i>Teleological</i>
3	Egois
4	<i>Conventional</i>
Sumber : Marwanto (2007)	

3. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

4) Pencegahan pengadaan barang dan jasa.

Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah serangkaian proses untuk memberikan kepastian bahwa pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa telah dilakukan sebagaimana peraturan yang ada (Tuankotta, 2007).

Tabel 1.4
Indikator Pengukur Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa (Y)

No.	Dimensi	Indikator Pengukur
1	<i>Fraud</i> manajemen	<ul style="list-style-type: none"> – Merahasiakan Informasi mengenai peluang untuk mendapatkan kontrak – Mengajukan standar teknis yang tidak bersifat diskriminasi – Data keuangan yang dilaporkan secara transparan
2	<i>Fraud</i> Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> – Mencuri sesuatu yang berharga (sebuah aktiva) – Mengkonversi aktiva tersebut ke bentuk yang dapat digunakan (Kas)
Sumber : Soejono (2000)		

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Hermiyetti (2010)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang.	Terdapat pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.

Rahmat (2018)	Moralitas dan Pengendalian Internal Dalam Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Individu dengan level moralitas rendah lebih cenderung melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak ada elemen pengendalian internal dibandingkan dengan kondisi ada elemen pengendalian internal. Dengan kata lain elemen pengendalian internal dapat menjadi alat yang mampu mengurangi kecenderungan individu dengan level moralitas rendah untuk melakukan kecurangan akuntansi.
Yuniarti dan Apandi (2012)	Peran auditor Internal dan Gejala <i>Fraud</i>	Peran auditor internal dalam pendeteksian <i>fraud</i> di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa <i>fraud</i> terjadi Karena lemahnya pengendalian internal dan anomali akuntansi
Muhammad Asim Asy'ari Prasetyono Bambang Haryadi (2013)	Peran Dan Fungsi Satuan Pengawasan Intern Dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Perguruan Tinggi X	SPI secara peran dan fungsi belum sampai pada taraf pencegahan <i>fraud</i> . Belum maksimalnya peran dan fungsi SPI dalam upaya pencegahan <i>fraud</i> karena berbagai faktor

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur pengaruh *internal control* terhadap pencegahan kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Untuk mengukur pengaruh SOP terhadap pencegahan kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Untuk mengukur pengaruh *internal control* yang dimoderasi penalaran etis terhadap kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa
4. Untuk mengukur pengaruh penerapan SOP yang dimoderasi penalaran etis terhadap pencegahan kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk menguji aplikasi teori dalam rangka merespon keberadaan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Apakah mampu untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan *Good University Governance*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi satuan kerja sebagai masukan kepada SPI perguruan tinggi pada umumnya dan SPI Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar pada khususnya serta pihak lainnya yang berkepentingan untuk dapat meningkatkan pengendalian guna mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi pengendalian internal di UIN Alauddin Makassar

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi peneliti sejenis baik bagi mahasiswa maupun *civitas* akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Agency Theory

Menurut Lane (2000) dalam Jatiningtyas (2011) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000 dalam Jatiningtyas, 2011). Misalnya, dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002 dalam Jatiningtyas 2011).

Sebagai bentuk baru pelayanan, BLU yang diterapkan di perguruan tinggi ini secara teoretik memiliki keterkaitan dengan teori agensi. Teori ini pertama dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) dalam Lestiyani (2015). Teori agensi menurut Handono Mardiyanto (2009) dalam Lestiyani (2015) lahir untuk menjembatani ketidakselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan kreditor. Teori agensi adalah suatu teori yang menjelaskan adanya hubungan posisi antara manajemen (sebagai agen) dengan pemegang saham (sebagai prinsipal). Dalam BLU, Perguruan tinggi negeri adalah manajemen yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah melalui kementerian yang terkait. Dalam teori agensi ini Pemerintah bertindak sebagai katalis dengan melakukan desentralisasi beberapa kewenangannya terhadap perguruan tinggi. Kewenangan pengelolaan keuangan yang sebelumnya ditangani langsung oleh kementerian keuangan, kini dalam konsep BLU ini

kewenangan pengelolaan keuangan diberikan kepada perguruan tinggi, demikian juga dengan pengelolaan organisasi yang sebelumnya menjadi wewenang penuh kementerian agama, kini pengelolaan organisasi langsung berada di perguruan tinggi yang berada di bawah naungannya.

Teori keagenan bermaksud menyelesaikan masalah yang muncul bila keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan juga disaat prinsipal merasa kesulitan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Teori keagenan juga menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (Syukry, 2006 dalam Ahriati, 2015).

Dalam hubungannya dengan pengendalian internal, teori ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan para *stakeholder*, sehingga sangat penting bagi sebuah instansi untuk memiliki suatu sistem pengendalian internal yang baik sebagai aturan yang berisi tentang acuan agar perbedaan kepentingan ini dapat disatukan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

B. Teori GONE

Teori *Gone* yang dikemukakan oleh Jack Bologna (1993) dalam Herman (2013) mengungkapkan mengapa seorang koruptor melakukan tindakan *fraud* yang

merupakan penyempurnaan dari teori *Triangle Fraud*. Teori *GONE* mengungkapkan ada empat alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik *fraud* yang meliputi unsur *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Need* (Kebutuhan), *Exposes* (Hukuman yang rendah)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum) (Yanavia, 2011).

1. Faktor generik

- a. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kesempatan kecil. Secara umum manajemen suatu instansi mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.
- b. Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan harus dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

2. Faktor individu

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori:

- a. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi resiko tersebut adalah: misi/tujuan organisasi/perusahaan yang ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan seluruh pihak (manajemen dan karyawan), aturan perilaku pegawai yang dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi/perusahaan, gaya manajemen dengan memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi dan aturan perilaku yang ditetapkan organisasi/perusahaan, serta praktik penerimaan pegawai dengan mencegah diterimanya karyawan yang bermoral tidak baik.
- b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabatn yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

Zaini, Carolina, &Setiawan (2015) meneliti Pengaruh *Fraud Diamond* dan *Gone Theory* Terhadap *Academic Fraud*. Mereka menyatakan bahwa tidak semua faktor yang terdapat dalam *Fraud Diamond* berpengaruh terhadap *fraud* (faktor tekanan berpengaruh positif, sedangkan kemampuan dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap *academic fraud*), sedangkan Faktor *Gone Theory* berpengaruh terhadap *fraud* (keserakahan, kesempatan, dan *exposes*

berpengaruh positif, sedangkan kebutuhan berpengaruh negatif terhadap perilaku *academic fraud*)

C. Internal Control (Pengendalian Internal)

Pengendalian internal adalah suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan mencegah dan menghalangi terjadinya *fraud* (Tuankotta, 2010). Pengendalian *intern* merupakan sistem dan alat yang dirancang sedemikian rupa oleh manajemen untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai berjalan dengan maksimal dan menghindari adanya kemungkinan penyelewengan maupun penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai (Asy'ari, 2013). Pengendalian internal meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan. Jadi pengendalian intern meliputi pengendalian akuntansi (*accounting control*) dan pengendalian administrasi (*administrative control*) (Tunggal, 1995).

Dalam manajemen, evaluasi dan pengendalian adalah komponen penting untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai organisasi terlaksana dengan baik. Evaluasi dan pengendalian dapat dilaksanakan sendiri oleh manajemen. Evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen berupa pengendalian *intern*. Pengendalian *intern* sendiri diistilahkan dengan pengawasan *intern* (PP 60 Tahun 2008). Pengawasan *intern*

atau *internal control* (Intosai, 2009) adalah proses yang integral oleh manajemen dan dirancang untuk mengatasi risiko serta memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai. Salah satu bentuk pelaksanaan *internal control* dalam organisasi adalah adanya internal audit.

Internal Control dan Perguruan Tinggi.

Sistem pengendalian intern Perguruan Tinggi adalah sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Perguruan Tinggi. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai/karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadilan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Wuryani, 2010). Lebih lanjut Wuryani (2010) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Perguruan Tinggi Negeri harus mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perguruan Tinggi. SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*).

Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern Perguruan Tinggi yang efektif.

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari komponen pengendalian intern lainnya. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi obyektif yang ada pada organisasi. Kondisi ini sebagian terbesar ditentukan oleh pimpinan organisasi, di mana lingkungan pengendalian meliputi nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan pengawas, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dan kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia Arens *et al.* (2006).

Menurut COSO (1992) dalam Wuryani (2010) lingkungan pengendalian intern merupakan landasan dari struktur pengendalian intern untuk organisasi. Lingkungan pengendalian menentukan "nada" dari organisasi. Hal tersebut merupakan pondasi untuk semua komponen lain pengendalian intern di suatu entitas dalam hal disiplin dan prosedur. COSO menegaskan bahwa pada beberapa perusahaan, lingkungan pengendalian ini memiliki pengaruh yang besar pada

bagaiman aktivitas bisnis distrukturkan dan bagaimana resiko yang ada dinilai. Lingkungan pengendalian merefleksikan semua perilaku, kesadaran dan tindakan dewan direksi, manajemen, dan pihak yang lain terkait dengan pentingnya pengendalian intern pada organisasi.

2. Penilaian risiko (*risk assessment*).

Resiko adalah kemungkinan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan. Manajemen seharusnya berhati-hati mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko yang menyebabkan tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Pada proses penilaian resiko, COSO menempatkan pertanggung-jawaban pada manajemen untuk melakukan tahapan-tahapan penilaian apakah resiko yang ada cukup signifikan dan kemudian melakukan tindakan yang sesuai (Wuryani, 2010)

Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko sebagaimana dimaksud terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko. Dalam rangka penilaian resiko pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan: 1) tujuan Instansi Pemerintah, 2) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Perguruan Tinggi melakukan penilaian resiko yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Perguruan Tinggi melakukan penilaian resiko wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Perguruan Tinggi, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: 1) strategi

operasional yang konsisten, 2) strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko (Wuryani, 2010).

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perguruan Tinggi dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima (Wuryani, 2010).

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*).

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan yang dapat membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Pimpinan Instansi Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan pengendalian meliputi: a) review atas kinerja Perguruan Tinggi yang bersangkutan, b) pembinaan sumber daya manusia, c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, d) pengendalian fisik atas aset, e) penetapan dan revidi atas indikator dan ukuran kinerja, f) pemisahan fungsi, g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas

transaksi dan kejadian, i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, k) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. (Wuryani, 2010)

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*).

Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Perguruan Tinggi harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Komponen pengendalian intern berupa komunikasi dan informasi menjelaskan bahwa informasi yang tepat harus diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan *timeframe* yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung-jawabnya (Wuryani, 2010).

Lebih lanjut Wuryani (2010) menjelaskan bahwa organisasi membutuhkan informasi yang sesuai untuk menyiapkan laporan keuangan yang dikomunikasikan kepada pengguna laporan. Sistem informasi yang buruk kualitasnya bisa menyebabkan adanya kesalahan informasi yang dihasilkan akan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat. Laporan harus

mengandung data dan informasi yang cukup untuk mendukung aktivitas pengendalian yang efektif.

5. Pemantauan (*monitoring*).

Sistem pengendalian internal perlu diawasi secara berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sehingga dapat ditentukan apakah operasi pengendalian memerlukan pembaharuan atau perbaikan. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern Perguruan Tinggi atau pihak eksternal Perguruan Tinggi. *Monitoring* adalah suatu proses untuk menilai kualitas kinerja sistem yang dilakukan setiap waktu. *Monitoring* meyakinkan apakah pengendalian intern beroperasi secara kontinyu dan efektif (Wuryani, 2010).

Beberapa penelitian mengenai *internal control* telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti R dan Apandi (2012) mengenai gejala *fraud* dan peran internal

auditor dalam pendeteksian *fraud* di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan anomali akuntansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

D. *Standard Operational Procedure*

Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa adalah jaringan prosedur dan urutan kegiatan atas proses pengadaan barang/jasa. Mustafa (2013) dalam Yanavia (2014) juga menjelaskan bahwa jika pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku maka tindak *fraud* dapat diminimalisir atau bahkan tidak mungkin terjadi, dan sebaliknya.

Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja & aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis; dan

menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. (Tjipto, 2005).

Menurut Bodnar dan Hopwood (2003:417) dalam Damayanti (2008), langkah-langkah umum dalam proses pengadaan adalah:

1. Penentuan Persyaratan

Tahap yang paling awal adalah permohonan pembelian. Permohonan pembelian adalah dokumen internal yang dibuat untuk meminta pengadaan sesuatu sehingga tersedia pada titik tertentu. Permohonan pembelian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan otomatis dengan sistem perencanaan material *materials requirements planning*. Saat selesai permohonan pembelian diteruskan ke penyedia untuk persetujuan.

2. Pemilihan Sumber

Langkah berikutnya adalah menugaskan sebuah sumber untuk memasok permohonan pembelian. Yang kemudian diperiksa apakah ada sebuah kontrak dengan pemasok untuk memasok barang yang diminta. Bila ada, maka hanya menyediakan jumlah yang dibutuhkan. Dan bila tidak, maka disiapkan dokumen permintaan penawaran.

3. Permintaan Penawaran

Setelah pemasok dipilih. Lalu membuat sebuah dokumen permintaan penawaran. Sebuah permintaan untuk penawaran dibuat untuk barang atau jasa dengan biaya

tinggi atau untuk barang atau jasa di mana penawarannya dibutuhkan sebagai kebijakan perusahaan. Ini adalah dokumen yang dikirimkan kepada pemasok yang mengundang mereka untuk mengkonfirmasi harga dan cara pembayaran untuk pasokan sebuah produk atau jasa.

4. Pemilihan Pemasok

Langkah berikutnya adalah membandingkan kebutuhan pengadaan dengan penawaran pemasok saat mereka catat dalam dokumen penawaran, lalu diidentifikasi penawaran mana yang paling sesuai untuk permohonan tersebut. Evaluasi pemasok sering membutuhkan keahlian atau pengalaman, kebanyakan penilaian pemasok didasarkan pada sistem poin.

5. Membuat Pesanan Pembelian

Selanjutnya perusahaan membuat dokumen pesanan pembelian. Dimana dokumen ini untuk mengidentifikasi seorang pemasok, mengkonfirmasi barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman, cara pengiriman, dan cara pembayaran. Kontrak adalah perjanjian garis besar di mana seorang pemasok menyediakan bahan untuk suatu periode waktu.

6. Penerimaan Barang

Saat pemasok membuat pengiriman, sebuah dokumen penerimaan barang disiapkan sebagai dokumen laporan penerimaan. Dokumen ini disiapkan saat sebuah item dikirimkan dari sumber dalam dan juga saat terjadi pemindahan inventaris (memindahkan satu barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya).

Dokumen penerimaan barang bisa disiapkan dengan tiga cara berbeda, antara lain:

1. Dengan sistem manajemen inventaris, saat barang diberikan kepada penyimpanan sementara. Setelah barang dikirimkan dan diperiksa serta dicatat, penerimaan barang selesai,
 2. Dengan mereferensikan kepada pesanan pembelian. Langkah ini dilakukan dengan memenuhi dokumen penerimaan barang menggunakan informasi dalam pesanan pembelian dan *mengupdate* pesanan pembelian untuk barang yang diterima,
 3. Diposkan ke dalam pemeriksaan mutu. Barang tidak bias digunakan hingga diperiksa dan disahkan. Bila lolos, pembuatan pos transfer dimasukkan untuk memindahkan dari pemeriksaan mutu ke persediaan yang tersedia.
7. Verifikasi faktur
- Tahap ini dilakukan untuk menjamin bahwa persyaratan biaya dan jumlah telah terpenuhi. Pemeriksaan dilakukan dengan penyesuaian tiga cara yang membandingkan pesanan pembelian dengan penerimaan barang dan dengan faktur.
8. Pembayaran Pemasok
- Pembayaran dibuat sesuai dengan cara pembayaran dan kondisi yang disebutkan dalam pesanan pembelian atau catatan induk pemasok.

E. Penalaran Etis

Etika dalam bahasa latin adalah *ethica*, yang berarti falsafah moral. Menurut Keraf (1998) dalam Marwanto (2007) etika secara harfiah berasal dari kata Yunani,

ethos (jamaknya *ta etha*), yang artinya sama dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan yang baik ini kemudian menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur tingkah laku yang etis ataupun tidak etis. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat. Dengan kata lain, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu etika dari bahasa Yunani dan moral dari bahasa Latin

Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Begitu pula yang dinyatakan oleh Welton (1994) bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Menurut Rest dan Narvaez (2000), semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan ‘hal yang benar’.

Pemikiran moral mengacu pada penggunaan beberapa alasan untuk menilai suatu kegiatan bisnis sebagai etika atau bukan. Ada empat gaya pemikiran yang mencerminkan hirarki dari pengembangan moral, yang mengingatkan apa tujuan pengembangan moral (Kohlberg *et al.*, 1983) dalam (Marwanto, 2007) Empat gaya pemikiran tersebut adalah *deontological*, *teleological*, *egois* atau *conventional*

(Fraedrich dan Ferrell, 1992a, 1992b; Harris dan Sutton, 1995; Reindenbach dan Robin, 1990) dalam (Marwanto, 2007)

Pada pendekatan *deontological*, perhatian tidak hanya pada perilaku dan tindakan, namun lebih pada bagaimana orang melakukan usaha dengan sebaik-baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuannya. Pemikiran *teleological* menekankan dalam maksimalisasi yang bermanfaat untuk masyarakat atau sebanyakbanyaknya orang. Pada pendekatan *teleological*, perhatian tidak hanya pada perilaku dan tindakan, namun lebih pada bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Pemikiran *conventional* mengacu pada penyesuaian hukum, norma, dan kode etik profesional. Pemikiran egois memperoleh kebaikan dari kepentingan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, hirarki akan memberikan tingkatan dari pengembangan etika dari egois ke *conventional* lalu ke *teleological* dan akhirnya ke *deontological*. Teori pengembangan moral mengenai pemikiran moral sangat penting sebagai konsep dari etika. Pemikiran moral akan mudah membuat pertimbangan moral dan perilaku moral. Kemudahan ini akan mencerminkan hak yang lebih tinggi dari pengembangan kognitif dalam pertimbangan dan perilaku. Oleh karena itu, seseorang cenderung untuk mempunyai pertimbangan moral menurut tingkat dari pengembangan dalam pemikiran moral seseorang. Kebutuhan mengidentifikasi dan mengukur faktor individual dan interaksi antara faktor situasional dan individual dalam memprediksi perilaku etis menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua faktor tersebut memengaruhi individu dalam melakukan kecurangan (Kisamoreet al., 2007 dalam

Pramita, 2014). Faktor individual menjadi penting untuk dipertimbangkan karena proses pengambilan keputusan seseorang tidak dapat dilihat secara parsial hanya dari faktor situasional saja, melainkan juga harus mempertimbangkan faktor yang melekat pada individu yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil (Rafinda, 2013).

Beberapa penelitian yang menguji pengaruh faktor individual seperti penalaran moral dan *locus of control* terhadap perilaku etis seseorang dilakukan oleh Trevino (1986), Tsui dan Ferdinand (1996), dan Rotter (1996) dalam Rafinda (2013). Beberapa penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penalaran moral dan *locus of control* dari seseorang akan memengaruhi mereka dalam berperilaku etis. Pertimbangan etis seseorang ketika menghadapi dilema etika adalah proses yang komprehensif dan rumit (Pramita, 2014).

F. Kecurangan (fraud)

Kecurangan Akuntansi (*fraud*) adalah serangkaian tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, kecurangan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang Sawyer (2006) dalam Thoyibatun (2012). Kecurangan akuntansi meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk melakukan tindak korupsi, tendensi untuk penyalahgunaan aset, dan tendensi untuk melakukan pelaporan keuangan yang menipu (Thoyibatun, 2012). Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisikan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak

semestinya terhadap aktiva yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku umum di Indonesia (Zainal, 2013)

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* ACFE (2011) dalam Zainal (2013) *fraud* adalah semua macam yang dipikirkan manusia dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah, licik atau tersembunyi, dan tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

Wilopo (2006) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi adalah keefektifan pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi dan moralitas manajemen.

Unsur-unsur Kecurangan

Dari beberapa definisi atau pengertian *fraud*, maka tergambarkan bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi). Dalam Widjaja (1992) dijelaskan unsur-unsur *fraud* secara umum adalah:

1. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*)
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*),
3. Fakta bersifat material (*material fact*),
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly orrecklessly*),

5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi,
6. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*) yang merugikannya (*detriment*).

Menurut Hall (2001:135) *fraud* menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain, dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung kepada fakta tersebut, fakta yang akan merugikan. Menurut hukum yang berlaku suatu tindakan curang (*fraudulent act*) harus memenuhi 5 kondisi:

- 1) Penyajian yang salah, harus terdapat laporan yang salah/tidak diungkapkan
- 2) Fakta yang sifatnya material, suatu fakta harus merupakan faktor yang substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak.
- 3) Tujuan, harus terdapat tujuan untuk menipu/pengetahuan bahwa laporan tersebut salah.
- 4) Ketergantungan yang dapat dijusdifikasi, penyajian salah harus merupakan faktor substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena ketergantungan.
- 5) Perbuatan tidak adil atau kerugian, kebohongan tersebut menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi korban *fraud*.

Klasifikasi kecurangan

Menurut Soejono (2000) kecurangan dapat di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kecurangan manajemen

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari orang dengan kelas ekonomi lebih atas dan terhormat yang biasa disebut *white collar crime* (Kejahatan kerah putih). Kecurangan manajemen ada dua tipe yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seorang yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatan itu. Kecurangan korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut misalnya manipulasi pajak.

2. Kecurangan Karyawan

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan manajemen, kesempatan untuk melakukan kecurangan bagi karyawan bawahan jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai wewenang. Pada umumnya semakin tinggi wewenang yang dimiliki, maka semakin besar kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Pencegahan Kecurangan Akuntansi

Untuk pencegahan terjadinya praktek kecurangan akuntansi dapat dilakukan beberapa cara. Wilopo (2006) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa upaya menghilangkan kecurangan akuntansi dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Mengefektifkan pengendalian internal, termasuk penegakan hukum.
2. Perbaiki sistem pengawasan dan pengendalian.

3. Pelaksanaan *good governance*
4. Memperbaiki moral dari pengelola perusahaan yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara dan masyarakat.

Sedangkan menurut Theodorus (2007: 272), upaya pencegahan *fraud* dimulai dari pengendaian *intern*, dan dua konsep penting lainnya adalah menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assessment*).

G. Pengadaan Barang/Jasa.

Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (government procurement) sebagai perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat). Lebih jauh Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mengungkapkan adanya karakteristik pengadaan barang / jasa di sektor privat (swasta) yang tidak ada pada pengadaan di sektor pemerintah. Beberapa karakteristik pengadaan barang/jasa disektor swasta yang tidak ada pada pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan antara lain:

1. Tidak terlalu menekankan proses tender kompetitif secara formal, dokumentasi prosedur pengadaan dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi.
2. Lebih menekankan untuk membeli barang yang memberikan *high value* sepadan dengan harganya, dan menunjuk kontraktor yang akan mampu memberikan kualitas jasa yang tinggi dengan harga yang kompetitif.

3. Dimensi akuntabilitas yang dituntut lebih ditekankan pada hasil (*result*) dan bukan pada proses pengadaan itu sendiri.

Dalam pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah justru berlaku hal yang berbeda, dimana proses dan dokumentasi atas kegiatan menjadi hal yang diperhatikan dan diatur, demikian pula dengan adanya konflik kepentingan (sesuai dengan Teori Agensi) yang mungkin terjadi. Dalam hal pekerjaan/barang yang diadakan, biasanya lebih menekankan pada harga terendah (*lowest cost*) dengan tetap memenuhi kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa saat ini telah diatur dalam Perpres No 16 tahun 2018, sehingga pada bulan Juli 2018 delapan pegawai UIN Alauddin yang terdiri dari sekretaris ULP, pejabat pengadaan, Pokja ULP dan staff PPK menghadiri seminar *4th Indonesian Procurement Forum dan Expo 2018 (4th IPEE 2018)* yang diadakan di JIExpo Kemayoran Jakarta yang membahas tentang isu-isu terbaru sesuai dengan Aturan Pengadaan terbaru Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Tujuan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah

Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mengemukakan beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

1. Ekonomis (*Economy*), yaitu untuk memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada waktu yang tepat dan dengan harga paling murah (*lowest cost*).
2. Mendorong Kompetisi (*Fostering competition*), yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada *supplier* yang memenuhi kualifikasi untuk bersaing secara sehat untuk mendapatkan kontrak pengadaan. Dengan adanya kompetisi, diharapkan akan diperoleh manfaat dalam hal harga dan kualitas, serta diharapkan akan mendorong akuntabilitas dalam proses pengadaan itu sendiri.
3. Substitusi impor (*Import substitution*), yaitu mendorong perusahaan lokal untuk menghasilkan barang/jasa yang semula hanya dapat diproduksi oleh perusahaan di luar negeri.
4. Penerapan *Good Governance* (*Practicing Good Governance*)
5. Melindungi kepentingan masyarakat (*Protecting the interest of citizens*)
6. Melindungi lingkungan (*protecting the Environment*)

Prinsip Umum Pengadaan barang / jasa pemerintah

Jourdain dan Balgobin (2003) dalam Sartono (2006) mengemukakan bahwa prinsip umum pengadaan barang / jasa pemerintah antara lain: Transparansi, ekonomis, efisiensi dan tepat waktu (*timelines*), serta keadilan (*fairness and equity*). Kegagalan terpenuhinya prinsip seperti yang telah disebutkan di atas mengindikasikan kemungkinan terjadinya korupsi atau praktek kecurangan (*fraudulent practices*) yang

biasanya didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau kesalahan dalam mengungkapkan fakta (*misrepresentation of facts*).

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 6, pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa. Sebab, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Etika pengadaan berkaitan dengan kelaziman dalam praktek dunia usaha yang dianggap akan menciptakan sistem persaingan usaha yang adil. Etika dalam pengadaan barang/jasa akan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk kepentingan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara. Dalam Modul Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia (2010) dalam Yanavia (2014) dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika pengadaan. Pengamalan terhadap etika pengadaan diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa berlangsung dengan baik.

Dalam Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 7 tentang etika pengadaan barang dan jasa menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Konsep Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Tuanakotta (2007) ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud. Ungkapan itu adalah: *fraud by need, by greed and by opportunity*. Ungkapan tersebut diartikan jika kita ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya. Tujuan utama pencegahan *fraud* adalah untuk menghilangkan sebab-sebab munculnya *fraud*. Menurut Amrizal (2004) *fraud* sering terjadi apabila:

- a. Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif.
- b. Pegawai diperkerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka
- c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau di-tempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan;
- d. Model manajemen melakukan *fraud*, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku
- e. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan;
- f. Industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi terjadinya *fraud*.

Menurut Pope (2003), pencegahan *fraud* dalam hal pengadaan barang publik, antara lain:

1. Memperkuat kerangka hukum.

Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-- prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan barang publik.

2. Prosedur transparan.

Selain dari kerangka hukum, pertahanan berikutnya melawan *fraud* adalah prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk melaksanakan proses pengadaan barang itu sendiri. Belum ada orang yang menemukan cara yang lebih baik untuk melawan *fraud* dalam pengadaan barang daripada prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

3. Membuka dokumen tender.

Satu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan di tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender atau wakilwakil mereka yang ingin hadir.

4. Evaluasi penawaran.

Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Bersamaan dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimanipulasi jika ada

pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu. Para penilai dapat menolak penawaran-penawaran yang tidak diinginkan dengan alasan yang dicari-cari, biasanya menyangkut pelanggaran prosedur seperti, ada bekas dihapus, sebuah halaman tidak diparaf atau dengan alasan penyimpangan dari spesifikasi, yang menuntut mereka cukup besar.

5. Melimpahkan wewenang.

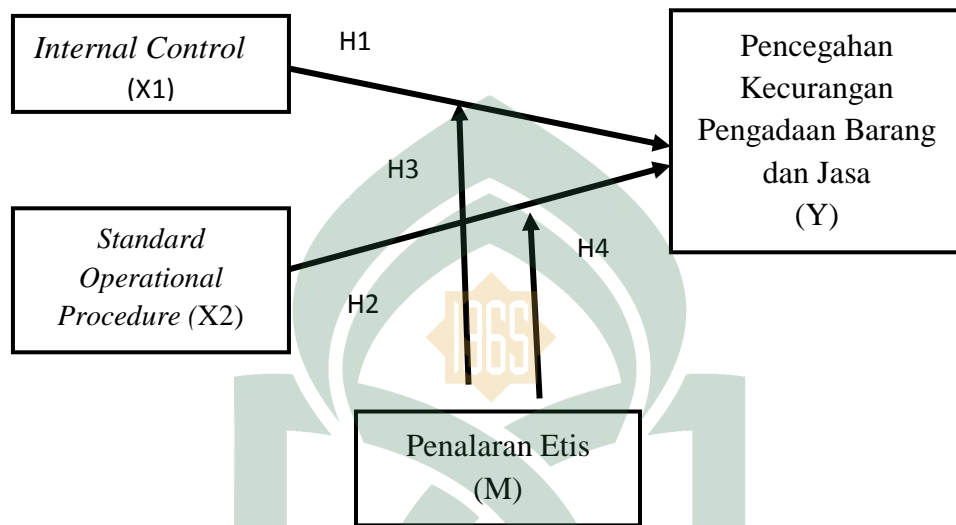
Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang penting dalam bidang pengadaan barang publik. Sayang, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan celah untuk melakukan kompsi. Khususnya, pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak merupakan bidang yang patut dibahas.

6. Pemeriksaan dan audit independen.

Tinjauan-ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang publik boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara, dalam hal kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak, untuk menentukan pemenang, dari sejak penawaran diajukan.

H. Rerangka Teoretis

Gambar 2.1 Rerangka Teoretis



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2009). Lokasi penelitian pada lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian asosiatif atau hubungan. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009).

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013: 118). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dari unit kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang secara struktural menjadi obyek pengendalian internal.

Sampel merupakan suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi (Kuncoro, 2013:118). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*

dengan kriteria unit kerja Universitas Islam Negeri Alauddin yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa dan para *Stakeholder*.

Penentuan yang akan dijadikan sampel merupakan unsur dari UIN Alauddin Makassar. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang mempunyai jabatan struktural atau *stakeholder* yaitu dekan dan wakil dekan, dan para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa seperti Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan dan staff PPK sehingga yang menjadi responden adalah pegawai yang mengerti tentang proses pengadaan dan pihak yang berperan penting dalam pengendalian internal pada wilayah tanggung jawabnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kuesioner yang akan dibagikan sebanyak 40 yaitu 4 kuesioner di setiap fakultas dan sebanyak 8 untuk Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan dan staff PPK, untuk menjamin efektivitas pengumpulan data, pendistribusian kuesioner dilakukan dengan cara mengantar sendiri.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek. Menurut Sugiyono (2009) data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap,

dan karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Alim, 2008). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab langsung oleh subjek penelitian melalui kuisioner.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, dimana sudah disediakan alternatif jawaban dari pertanyaan yang telah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009).

Menurut Bachtar (1997) kuesioner atau angket merupakan alat pengumpulan data dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Diharapkan dengan menyebarkan daftar pernyataan-pernyataan kepada responden, peneliti dapat menghimpun data relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki tingkat reliabilitas serta validitas yang tinggi

Untuk memperoleh data yang sebenarnya kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi tempat responden.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kuesioner atau angket tertutup, dimana responden hanya memilih jawaban yang tersedia. Skala pengukuran yang digunakan dalam instrumen ini adalah skala *likert*.

Skala *Likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Priyatno, 2010). Data diolah dengan menggunakan skala *likert* dengan jawaban atas pertanyaan yaitu skala nilai 1-5. Nilai yang dimaksud adalah skor atas jawaban responden, dimana nilai yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
skala likert

Simbol	Jawaban Angket Penelitian	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Ciri khas dari skala *likert* adalah bahwa makin tinggi skor yang diperoleh oleh seorang responden merupakan indikasi bahwa responden tersebut sikapnya semakin positif terhadap obyek yang ingin diteliti oleh peneliti.

G. Metode Analisis Data

1. Analisis Data Deskriptif

Deskriptif karakteristik responden tersebut menjelaskan tentang gambaran umum responden seperti jenis kelamin, umur responden, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi (prosentase). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 22.0. Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pernyataan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu

dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai signifikansi di bawah 0.05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2013).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dapat dikatakan *reliabel* (andal) bila memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0.70 (Nunnaly, 1960 dalam Ghozali 2013:48).

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji klasik data primer ini, maka peneliti melakukan Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas. Uji asumsi klasik yang dilakukan sebagai berikut :

a. Uji Multikolinieritas

Multikoloniearitas berarti bahwa antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi saling berkorelasi linear. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2013: 105).

b. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas berarti *varians* (variasi) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali 2013:139).

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013: 28). Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengambilan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau garis diagonal, maka regresi mengikuti garis normalitas, sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan.

Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pencegahan *Fraud* Pengadaan barang/jasa

α = Konstanta

X_1 = *Internal Control*

X_2 = Penerapan SOP

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi berganda

e = *error term*

Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak Menurut Frucot dan Shearon (1991) dalam Ghozali (2013) interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X_1 dan X_2 dan berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika skor tinggi untuk variabel *internal control* dan *standard operating procedure* berasosiasi dengan skor rendah penalaran etis (skor

tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel *internal control* dan *standard operating procedure* berasosiasi dengan skor tinggi dari penalaran etis (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX_1 + \beta_2 ZX_2 + \beta_3 ZM + \beta_4 |ZX_1 - ZM| + \beta_5 |ZX_2 - ZM| + e$$

Keterangan :

Y = Pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa

α = Konstanta

X_1 = *Internal Control*

X_2 = SOP

X_3 = Penalaran etis

$ZX_1 - ZM - ZX_2 - ZM$ = Interaksi antara *internal control*, SOP dengan Pealaran etis

$\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien regresi berganda

e = *error term*

Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi secara parsial (t-test):

1) Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a) Jika R^2 mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat.
- b) Jika R^2 mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

2) Uji Regresi Secara Parsial

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu:

1) Membandingkan t hitung dengan t tabel

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen

2) Melihat *Probabilities Values*

Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$:

- a) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak
- b) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima
- c) Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif) walaupun berada dibawah tingkat signifikan maka hipotesis ditolak.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UIN Alauddin Makassar

1. Sejarah Perkembangan UIN Alauddin Makassar

Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase, yaitu:

a. Fase tahun 1962 s.d 1965

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan rector IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 november 1962. Kemudian meneyusul penegrian fakultas tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 November 1964 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 November 1964. Kemudian menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.

b. Fase tahun 1965 s.d 2005

Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institusi tersendiri sedang tiga fakultas dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 November 1965 berstatus mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965.

Penamaan IAIN di Makassar dengan “Alauddin” diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Agama Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia bagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah Raja Gowa XIV tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangnga”rangi” Daeng Manrabbia Sulatan Alauddin, yang setelah wafatnya digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat dalam kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi). lainnya gelar setelah wafatnya adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaa. Ide pemberian nama Alauddin

kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN “Alauddin”, diantaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar.

Pada fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki 3 buah fakultas, berkembang menjadi lima (5) buah fakultas ditandai dengan berdirinya Fakultas Adab berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 November 1967, disusul fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba (153 km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 bestatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri

c. Fase Tahun 2005 s.d sekarang

Untuk merespon tuntutan perkembangan Ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 dimana jenjang Pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional No.2 dan Departemen Agama R.I telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang Pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang Pendidikan menengah dibawah

naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden RI dan Menteri Pendidikan Nasional RI Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berdasarkan Perarutan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR. H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.

Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN Alauddin Makassar mengalami perkembangan dari 5(lima) Fakultas menjadi 8 (delapan) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana (PPs) beredasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu:

- 1) Fakultas Syari'ah dan Hukum
- 2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- 3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- 4) Fakultas Adab dan Humaniora
- 5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- 6) Fakultas Sains dan Teknologi
- 7) Fakultas Ilmu Kesehatan
- 8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- 9) Program Pascasarjana (PPs)

2. *Visi, Misi dan Tujuan UIN Alauddin Makassar*

a. Visi UIN Alauddin Makassar

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam

b. Misi UIN Alauddin Makassar

Sedangkan misinya adalah untuk:

- 1) Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mereflesikan kemampuan integrase antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
- 3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

c. Tujuan UIN Alauddin Makassar

- 1) Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insan yang kuat dengan pertimbangan kearifan local
- 2) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrase keilmuan
- 3) Terciptanya system manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami.

- 4) Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga local, nasional, dan internasional

3. *Struktur Organisasi UIN Alauddin Makassar*

Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar diatur dalam Alauddin Makassar. Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Agama tersebut menyebutkan bahwa UIN Alauddin Makassar terdiri atas:

- a. Dewan Penyantun
- b. Rektor dan Pembantu Rektor
- c. Senat Universitas
- d. Fakultas
 1. Syariah dan Hukum
 2. Tarbiyah dan keguruan
 3. Ushuluddin dan filsafat
 4. Adab dan Humaniora
 5. Dakwah dan Komunikasi
 6. Sains dan Teknologi
 7. Ilmu Kesehatan
 8. Ekonomi dan Bisnis Islam
- e. Program Pascasarjana
- f. Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan
- g. Biro Administrasi Umum

- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Perpustakaan
- j. Pusat Bahasa
- k. Pusat Informasi dan Pangkalan Data (Pustipad)
- l. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

4. Elemen-Elemen Logo UIN Alauddin Makassar:

1. Elemen pertama, pola dasar masjid yang melambangkan UIN Alauddin Makassar sebagai pusat pembinaan akhlak dan kepribadian muslim, pusat pencerahan dan transformasi ipteks, dan pusat pengembangan peradaban Islam.
2. Elemen kedua, terdiri atas kubah masjid yang melambangkan UIN Alauddin sebagai wadah penerapan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbasis pada ajaran Islam, pintu masjid berarti UIN Alauddin sebagai pintu gerbang pembangunan manusia muslim yang berakhlak mulia dan berpegang teguh pada kebenaran Islam, serta mata pena yang berarti UIN Alauddin sebagai pusat transformasi dan pengembangan ipteks berbasis pada prinsip dan nilai Islam.
3. Elemen Ketiga, yaitu perahu pinisi tampak dari depan yang mengartikan keberadaan UIN Alauddin di wilayah Sulsel, keuletan dan kekokohan dalam perjalanan mengemban misi untuk mencapai tujuan UIN Alauddin Makassar.



Gambar 4.1
Logo UIN Alauddin

4. Elemen keempat, yaitu dua buku yang terintegrasi yang terdiri dari buku berwarna hijau yang melambangkan Al quran-Hadis sebagai kitab sumber dan buku berwarna putih melambangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Integrasi kedua buku tersebut melambangkan integrasi keilmuan UIN Alauddin Makassar sebagai kampus peradaban.
5. Elemen kelima, yaitu *Islamic Star* sebagai simbol 3P UIN Alauddin sebagai pusat pencerdasan, pencerahan dan prestasi. Dimana, dalam simbol Islamic Star terdapat angka 1965 sebagai petanda tahun kelahiran UIN Alauddin Makassar yang dituliskan dengan pola aksara lontara dan bermaksa keteguhan UIN Alauddin dalam nilai islam dan kearifan lokal.
6. Elemen keenam, Penulisan "Alauddin" di logo menggunakan font Philosopher yang menunjukkan UIN Alauddin memberi pelayanan yang fleksibel, luwes, dan terbuka untuk menjadi kampus yang lebih baik. Sedangkan, tulisan "Universitas Islam Negeri" dan "Makassar" memakai font jenis Kartika Bold yang menggambarkan kekuatan, ketegasan dan komitmen untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing. Warna hijau melambangkan kesuburan, kesejukan dan kesungguhan. Sedangkan warna kuning emas melambangkan kejayaan, kemuliaan, kesetiaan dan pengabdian.

B. Analisis Hasil Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan mendatangi langsung responden yang menjadi obyek dalam penelitian yaitu Dekan dan wakil dekan, Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan dan staff PPK. Kuesioner yang kembali sebanyak 32 kuesioner dari jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 40 kuesioner, beberapa yang dari kuesioner yang tidak kembali karena merasa bahwa isi dari kuesioner diluar dari topoksinya.

A. Uji Kualitas Data

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui *item* pernyataan itu valid dengan melihat nilai *Corrected Item Total Corelation*. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung $>$ dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 32 responden dan besarnya df dapat dihitung $32-2 = 30$ dengan $df = 30$ dan $\alpha = 0,05$ didapat r tabel = 0,3494. Jadi, *item* pernyataan yang valid mempunyai

r hitung lebih besar dari 0,3494. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
<i>Internal Control</i>	X1.1	0,501	0,3494	Valid
	X1.2	0,608	0,3494	Valid
	X1.3	0,771	0,3494	Valid
	X1.4	0,753	0,3494	Valid
	X1.5	0,413	0,3494	Valid
	X1.6	0,406	0,3494	Valid
	X1.7	0,713	0,3494	Valid
	X1.8	0,373	0,3494	Valid
	X1.9	0,643	0,3494	Valid
	X1.10	0,691	0,3494	Valid
	X1.11	0,671	0,3494	Valid
	X1.12	0,824	0,3494	Valid
	X1.13	0,540	0,3494	Valid
	X1.14	0,849	0,3494	Valid
	X1.15	0,630	0,3494	Valid
SOP	X2.1	0,625	0,3494	Valid
	X2.2	0,704	0,3494	Valid
	X2.3	0,491	0,3494	Valid
	X2.4	0,535	0,3494	Valid
	X2.5	0,549	0,3494	Valid
	X2.6	0,648	0,3494	Valid
	X2.7	0,739	0,3494	Valid
	X2.8	0,453	0,3494	Valid
	X2.9	0,640	0,3494	Valid
	X2.10	0,773	0,3494	Valid
Penalaran Etis	M1	0,861	0,3494	Valid
	M2	0,842	0,3494	Valid
	M3	0,819	0,3494	Valid
	M4	0,802	0,3494	Valid
	M5	0,786	0,3494	Valid
	M6	0,717	0,3494	Valid

Pencegahan <i>fraud</i> Pengadaan barang dan jasa	Y1	0,727	0,3494	Valid
	Y2	0,825	0,3494	Valid
	Y3	0,669	0,3494	Valid
	Y4	0,702	0,3494	Valid
	Y5	0,785	0,3494	Valid
	Y6	0,744	0,3494	Valid
	Y7	0,474	0,3494	Valid
	Y8	0,592	0,3494	Valid
	Y9	0,457	0,3494	Valid
	Y10	0,691	0,3494	Valid
	Y11	0,541	0,3494	Valid
	Y12	0,601	0,3494	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Tabel 4.1 tersebut memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari pada R-tabel. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* yakni suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
1	<i>Internal Control</i>	0,889	Reliabel
2	SOP	0,814	Reliabel
3	Penalaran Etis	0,890	Reliabel
4	Pencegahan <i>Fraud</i>	0,856	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel *Internal Control*, SOP, Penalaran etis dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

B. Uji Asumsi Klasik

Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda untuk uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian *one sample*

kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $> 0,05$.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.56130199
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.101
	Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		.744
Asymp. Sig. (2-tailed)		.638

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,638, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian

multikolinearitas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF), sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut.
- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , maka dapat diartikan bahwa terdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Internal Control	.280	3.571
	SOP	.306	3.272
	Penalaran Etis	.303	3.303

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 diatas, nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel *internal control* senilai 3.571, *SOP* senilai 3.272, dan penalaran etis senilai 3.303. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Hasil ini didukung oleh nilai *tolerance* yang juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Dimana variabel *internal control* senilai 0, .280, *SOP* senilai 0,306, dan penalaran etis senilai 0, .303.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.5. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.305	2.971		.776	.444
Internal Control	-.007	.080	-.029	-.082	.935
SOP	-.009	.119	-.026	-.077	.939
Penalaran Etis	.016	.132	.042	.123	.903

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Hasil uji *Glejser* pada Tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa probabilitas untuk semua variabel independen tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

C. Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H_1 dan H_2 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independent (*Internal control* dan *SOP*) terhadap variabel dependen (pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa), sedangkan untuk menguji hipotesis H_3 dan H_4 , menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan absolut residual atau uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21.

1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H_1 dan H_2

Pengujian hipotesis H_1 dan H_2 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh *Internal control* dan *SOP* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834 ^a	.696	.675	3.64464

a. Predictors: (Constant), *SOP*, *Internal Control*

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas nilai R adalah 0,834 atau 83,4% menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0,80-1,00. Hal ini menunjukkan bahwa *internal control* dan *SOP* berpengaruh kuat terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai R^2 (*Adjusted R*

Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,675, hal ini berarti bahwa 67,5% yang menunjukkan bahwa *pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa* dipengaruhi oleh variabel *internal control* dan *SOP*. Sisanya sebesar 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.7
Hasil Uji F – Uji Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	880.000	2	440.000	33.124	.000 ^b
Residual	385.219	29	13.283		
Total	1265.219	31			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), SOP, Internal Control

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 33,124 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai F hitung (33,124) lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3,33 ($df_1=32-3=30$ dan $df_2=3-1=2$). Berarti variabel *internal control* dan *SOP* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Tabel 4.8
Hasil Uji T – Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.655	5.811		.973	.338
Internal Control	.308	.146	.359	2.105	.044
SOP	.691	.228	.518	3.038	.005

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 5,655 + 0,308 X_1 + 0,691 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa

X_1 = *Internal Control*

X_2 = SOP

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

e = Standar *error*.

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai konstanta sebesar 5,655 mengindikasikan bahwa jika variabel independen

(*Internal control* dan SOP) adalah nol maka pencegahan *fraud* akan terjadi sebesar

5,655.

- b. Koefisien regresi variabel *internal control* (X1) sebesar 0,308 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel *obedience pressure* akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 0,308.
- c. Koefisien regresi variabel SOP (X2) sebesar 0,691 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel SOP akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 0,691

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1 dan H2) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Internal control berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (H1)*

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel *internal control* memiliki t hitung sebesar $2.105 > t \text{ tabel sig. } \alpha=0,05 \text{ dan } df = n-k, \text{ yaitu } 32-3=29 \text{ t tabel } 2,0452$ dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,308 dan tingkat signifikansi 0,044 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini berarti *internal control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan *internal control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik internal control maka semakin baik pula dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

b. Penerapan SOP Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa (H2).

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel SOP memiliki t hitung sebesar $3.038 > t$ tabel $2,0452$ dengan koefisien beta unstandardized sebesar $0,691$ dan tingkat signifikansi 0.005 yang lebih kecil dari $0,05$, maka H_a diterima. Hal ini berarti penerapan SOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan penerapan SOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik SOP yang diterapkan maka akan sedikit pula *fraud* pengadaan barang dan jasa yang terjadi

2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak terhadap Hipotesis Penelitian H3 dan H4.

Untuk membuktikan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2013:214).

Tabel 4.9
Kriteria Penentu Variabel moderating

NO	Tipe Moderasi	Koefisien
1	<i>Pure</i> Moderasi	b2 Tidak Signifikan b3 Signifikan
2	<i>Quasi</i> Moderasi	b2 Signifikan b3 Signifikan
3	<i>Homologiser</i> Moderasi (Bukan Moderasi)	b2 Tidak Signifikan b3 Tidak Signifikan
4	Prediktor	b2 Signifikan b3 Tidak Signifikan

Keterangan:

b2: Variabel penalaran etis

b3: Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (*internal control* dan SOP) dengan variabel penalaran etis.

Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.863	2.36883

a. Predictors: (Constant), X2_M, X1_M, Zscore: SOP, Zscore: Penalaran Etis, Zscore: Internal Control

Berdasarkan tabel 4.9 di atas nilai R adalah 0,941 atau 94% menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0,80 – 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Zscore: *Internal control*, Zscore: SOP, Zscore: Penalaran etis, X1_M, dan X2_M berpengaruh sangat kuat terhadap Pencegahan *fraud* Pengadaan barang dan jasa. Hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R^2 (*Adjusted R Square*) sebesar 0,863 yang berarti pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa yang dapat dijelaskan oleh variabel Zscore: *internal control*, Zscore: SOP, Zscore: Penalaran etis, X1_M, dan X2_M sekitar 86,3%. Sisanya sebesar 13,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.11
Hasil Uji F – Uji Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1119.324	5	223.865	39.895	.000 ^b
	Residual	145.895	26	5.611		
	Total	1265.219	31			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), X2_M, X1_M, Zscore: SOP, Zscore: Penalaran Etis, Zscore: Internal Control

Hasil Anova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 39.895 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Zscore: *internal control*, Zscore: SOP, Zscore: Penalaran etis, X1_M, dan X2_M secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Tabel 4.12
Hasil Uji T – Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	49.699	1.014		48.995	.000
Zscore: Internal Control	.584	.821	.091	.712	.483
Zscore: SOP	.976	.794	.153	1.229	.230
Zscore: Penalaran Etis	4.757	.790	.745	6.020	.000
X1_M	3.168	1.309	.166	2.421	.023
X2_M	2.437	1.144	.147	2.130	.043

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 49.699 + 0,584 \text{ ZX1} + 0,976 \text{ ZX2} + 4.757 \text{ ZM} + 3.168 | \text{ZX1-ZM} | + 2.437 | \text{ZX2+ZM} | e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 49.699 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (Zscore: *Internal control*, Zscore: *SOP*, Zscore: *Penalaran etis*, X1_M, dan X2_M) tidak ada, maka *pencegahan fraud* *pengadaan barang dan jasa* akan terjadi sebesar 49.699.
- Koefisien regresi variabel Zscore: *internal control* sebesar 0.584 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel Zscore: *internal control* akan meningkatkan *pencegahan fraud* sebesar 0.584.

- c. Koefisien regresi variabel Zscore: SOP sebesar 0.976 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel Zscore: *SOP* akan meningkatkan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa sebesar 0,976
- d. Koefisien regresi variabel Zscore: penalaran etis sebesar 4,757 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel Zscore: penalaran etis akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 4,757.
- e. Koefisien regresi variabel X1_M sebesar 3.168 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel X1_M akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 3.168
- f. Koefisien regresi variabel X2_M sebesar 2.437 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan variabel X2_M akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 2.437.

Tabel 4.12a
Hasil Uji T- Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,341	4,269		4,062	,000
1 Internal Control	,122	,113	,142	1,081	,049
Penalaran Etis	1,165	,195	,787	5,973	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 17,341 + 0,122 X1 + 1,165 X2 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa

X1 = *Internal Control*

X2 = Penalaran Etis

a = Konstanta

b1, b2 = Koefisien regresi

e = Standar *error*.

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 17,341 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (*Internal control* dan Penalaran etis) adalah nol maka pencegahan *fraud* akan terjadi sebesar 17,341.
- Koefisien regresi variabel *internal control* (X1) sebesar 0,122 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel *obedience pressure* akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 0,122
- Koefisien regresi variabel SOP (X2) sebesar 1,165 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel SOP akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 1,165

Tabel 4.12b

Hasil Uji T- Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,873	4,151		3,342	,002
SOP	,347	,159	,260	2,180	,037
Penalaran Etis	1,034	,177	,698	5,854	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud
 Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 13,873 + 0,347 X_1 + 1,034 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud* pengadaan barang dan jasa

X₁ = SOP

X₂ = Penalaran Etis

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien regresi

e = Standar *error*.

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 13,873 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (*Internal control* dan Penalaran etis) adalah nol maka pencegahan *fraud* akan terjadi sebesar 13,873.
- b. Koefisien regresi variabel *internal control* (X₁) sebesar 0,347 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel *obedience pressure* akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 0,347

- c. Koefisien regresi variabel SOP (X₂) sebesar 1,034 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel SOP akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 1,034

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H₃ dan H₄) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Penalaran Etis Memoderasi Internal Control Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa (H₃).

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa penalaran etis (b₂) signifikan atau ada pengaruh variabel penalaran etis terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya interaksi *internal control* dan penalaran etis (b₃) juga berada pada tingkat signifikan. Maka Berdasarkan nilai signifikansi tersebut, penalaran etis dapat dikatakan sebagai *Quasi moderasi*. Hal ini diperkuat oleh hasil uji T- uji Parsial pada tabel 4.11a yang menunjukkan adanya interaksi penalaran etis terhadap pencegahan *fraud* yang berpengaruh positif dengan nilai yang signifikan. *Quasi moderasi* merupakan variabel yang berfungsi sebagai variabel predictor (undependent) dan sekaligus juga berinteraksi dengan variabel predictor lainnya (X) (Ghozali, 2013). Jadi, dalam penelitian ini variabel penalaran etis dapat dikatakan sebagai variabel yang dapat memoderasi pengaruh *internal control* terhadap pencegahan *fraud* namun sekaligus juga dapat berfungsi sebagai variabel yang secara langsung mempengaruhi pencegahan *fraud*.

Hal ini berarti bahwa variabel penalaran etis bisa dikatakan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel *internal control* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Jadi hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan penalaran etis memoderasi hubungan *internal control* terhadap pencegahan *fraud* terbukti atau diterima.

b. Penalaran etis memoderasi penerapan SOP terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (H_3).

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa penalaran etis (b_2) signifikan atau ada pengaruh variabel penalaran etis terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya interaksi SOP dan penalaran etis (b_3) juga berada pada tingkat signifikan. Maka Berdasarkan nilai signifikansi tersebut, penalaran etis dapat dikatakan sebagai *Quasi moderasi*. Hal ini diperkuat oleh hasil uji T- uji Parsial pada tabel 4.11b yang menunjukkan adanya interaksi penalaran etis terhadap pencegahan *fraud* yang berpengaruh positif dengan nilai yang signifikan. *Quasi moderasi* merupakan variabel yang berfungsi sebagai variabel predictor (undependent) dan sekaligus juga berinteraksi dengan variabel predictor lainnya (X) (Ghozali, 2013). Jadi, dalam penelitian ini variabel penalaran etis dapat dikatakan sebagai variabel yang dapat memoderasi pengaruh *internal control* terhadap pencegahan *fraud* namun sekaligus juga dapat berfungsi sebagai variabel yang secara langsung mempengaruhi pencegahan *fraud*.

Hal ini berarti bahwa variabel penalaran etis bisa dikatakan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel SOP terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Jadi hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan penalaran etis memoderasi hubungan SOP terhadap pencegahan *fraud* terbukti atau diterima.

D. Analisis deskriptif

a. Analisis deskriptif variabel

Deskripsi variabel dari 32 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Internal Control</i>	32	40.00	72.00	61.3438	7.45139
SOP	32	26.00	48.00	40.6563	4.78984
Penalaran Etis	32	13.00	30.00	23.8750	4.31614
Pencegahan Fraud	32	37.00	60.00	52.6563	6.38855
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Tabel 4.12 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel *Internal Control* menunjukkan nilai minimum sebesar 40, nilai maksimum sebesar 72, mean (rata-rata) sebesar 61.3438 dengan standar deviasi sebesar 7.45139 yang apabila dibagi dengan 15 butir pernyataan, maka diperoleh rata-rata jawaban responden adalah pada skala 4 untuk skor rata-rata peritem. Hal ini

menunjukkan bahwa untuk variabel *Internal Control* rata-rata responden menjawab “setuju” berdasarkan skala kuesioner.

Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel SOP (*standar operating procedure*) menunjukkan nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum sebesar 48, mean (rata-rata) sebesar 40.6563 dengan standar deviasi sebesar 4.78984 yang apabila dibagi dengan 10 butir pernyataan, maka diperoleh rata-rata jawaban responden adalah pada skala 4 untuk skor rata-rata peritem. Hal ini menunjukkan bahwa untuk variabel SOP responden menjawab “setuju” berdasarkan skala kuesioner.

Variabel penalaran etis menunjukkan nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 23.8750, dengan standar deviasi sebesar 4.31614 yang apabila dibagi dengan 6 butir pernyataan, maka diperoleh rata-rata jawaban responden adalah pada skala 4 untuk skor rata-rata peritem. Hal ini menunjukkan bahwa untuk variabel pertimbangan etika rata-rata responden menjawab “setuju” berdasarkan skala kuesioner. Variabel Pencegahan *Fraud* menunjukkan nilai minimum sebesar 37, nilai maksimum sebesar 60, mean (rata-rata) sebesar 52.6563 dengan standar deviasi sebesar 6.38855 yang apabila dibagi dengan 12 butir pernyataan, maka diperoleh rata-rata jawaban responden adalah pada skala 4 untuk skor rata-rata peritem. Hal ini menunjukkan bahwa untuk variabel pencegahan *fraud* rata-rata responden menjawab “setuju” berdasarkan skala kuesioner.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel *Internal Control* yakni 61.3438, sedangkan yang terendah adalah variabel Penalaran Etis yaitu 23.8750. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel *Internal Control* yaitu 7.45139 dan yang terendah adalah variabel Penalaran Etis yaitu 4.31614.

b. Analisis Deskriptif Pernyataan

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *internal control*, *standard operating procedure*, penalaran etis dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data yaitu:

1) Analisis Deskriptif Variabel Internal Control (X1).

Analisa deskripsi terhadap variabel *internal control* terdiri dari lima belas item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai *internal control*. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.14
Deskripsi Item Pernyataan Variabel *Internal Control*

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentas					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
X1.1	0	2	1	10	19	142	4,44
X1.2	1	0	1	14	16	140	4,38
X1.3	0	1	4	15	12	134.	4.19
X1.4	0	6	4	15	7	119	3.72
X1.5	0	1	3	22	6	129	4.03
X1.6	0	0	3	24	5	130	4.06
X1.7	0	0	9	15	5	118	3.69
X1.8	0	0	2	21	9	135	4.22

X1.9	1	0	6	13	8	119	3.72
X1.10	0	0	4	14	14	138	4.31
X1.11	0	0	3	19	9	132	4.13
X1.12	0	1	4	17	10	131	4.10
X1.13	0	3	5	14	10	127	3.97
X1.14	0	1	2	16	13	137	4.28
X1.15	0	0	4	20	8	132	4.12
Rata-rata Keseluruhan							3,50

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa dari 32 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada *Internal control* (X1) berada pada skor 3,50. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menjawab angka empat atau setuju terhadap setiap item pernyataan. Pada variabel *internal control*, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,44 berada pada item pernyataan pertama. Sebagian besar responden berpendapat bahwa aturan telah diterapkan kepada seluruh tingkatan tidak memandang baik itu seorang pimpinan atau hanya pegawai biasa.

2) Analisis Deskriptif Variabel Standard Operating Procedure (SOP) (X2)

Analisa deskripsi terhadap variabel *Standard Operating Procedure (SOP)* terdiri dari sepuluh item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai *Standard Operating Procedure (SOP)*. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.15
Deskripsi Item Pernyataan Variabel SOP

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
X2.1	0	0	2	5	25	151	4.72
X2.2	0	0	3	20	8	131	4.09
X2.3	0	0	1	19	12	139	4.34
X2.4	0	0	2	17	13	139	4.34
X2.5	0	7	13	8	4	105	3.28
X2.6	0	4	8	14	6	118	3.69
X2.7	1	1	5	18	7	125	3.91
X2.8	0	1	0	14	17	143	4.47
X2.9	0	3	0	18	6	121	3.78
X2.10	1	0	4	19	5	129	4.03
Rata-rata Keseluruhan							4.06

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa dari 32 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada *SOP* (X2) berada pada skor 4.06. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menjawab angka empat atau setuju terhadap setiap item pernyataan. Pada variabel *SOP*, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,72 berada pada item pernyataan pertama, hal ini menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa *SOP* yang telah diterapkan mampu membuat karyawan lebih paham akan tugasnya. Sementara untuk persepsi responden dengan nilai rendah berada pada item pernyataan kelima dengan skor 3,28 yang menunjukkan bahwa mereka menerima bahwa *SOP* yang diterapkan telah mampu mengurangi beban pengawasan.

3) *Analisis Deskriptif Variabel Penalaran etis (M)*

Analisa deskripsi terhadap variabel penalaran etis terdiri enam item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai penalaran etis. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.16
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Penalaran Etis

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
M1	0	3	3	19	7	126	3.94
M2	0	3	6	14	9	125	3.91
M3	0	5	3	15	9	124	3.87
M4	0	4	7	14	7	120	3.75
M5	0	1	6	15	10	130	4.06
M6	0	2	1	13	16	139	4.34
Rata-rata Keseluruhan							3,98

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa dari 32 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada penalaran etis (M) berada pada skor 3,98. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menjawab angka empat atau setuju terhadap setiap item pernyataan. Pada variabel penalaran etis, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,34 berada pada item pernyataan keenam, hal ini menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa suatu keadaan harus dilaporkan seperti kondisi yang sebenarnya dengan mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan pemerintahan. Sementara untuk persepsi responden dengan nilai rendah berada pada item pernyataan keempat dengan

skor 3,75 yang menunjukkan bahwa karyawan tidak setuju untuk mempertahankan penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan meski merupakan suatu menjadi kelaziman.

4) Analisis Deskriptif Variabel Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa (Y)

Analisa deskripsi terhadap variabel Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa terdiri dari duabelas item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.17
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	R	S	SS		
Y1	0	1	1	7	23	148	4.62
Y2	0	0	1	11	20	147	4.59
Y3	1	0	2	8	21	144	4.50
Y4	1	1	1	13	16	138	4.31
Y5	0	1	2	12	17	141	4.41
Y6	0	0	3	9	20	145	4.53
Y7	0	0	1	11	20	147	4.59
Y8	0	0	2	18	12	138	4.31
Y9	0	1	6	13	12	132	4.12
Y10	1	1	3	6	21	141	4.41
Y11	1	4	3	5	19	133	4.16
Y12	2	1	6	6	17	131	4.09
Rata-rata Keseluruhan							4,37

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa dari 32 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa (Y) berada pada skor 4,37. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menjawab angka empat atau setuju terhadap setiap item pernyataan. Pada variabel Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4.5 berada pada item pernyataan pertama hal ini menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan telah menggunakan pedoman peraturan yang berlaku dalam mencegah terjadinya kecurangan. Sementara untuk persepsi responden dengan nilai rendah berada pada item pernyataan kedubelas dengan skor 4,09 yang menunjukkan responden setuju bahwa audit independen memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengadaan di instansi dalam hal ini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

E. Pembahasan Penelitian

Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini secara ringkas disajikan sebagai berikut ini:

Tabel 4.18
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H ₁	<i>Internal control</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.	Hipotesis diterima
H ₂	<i>Standard Operational Procedure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.	Hipotesis diterima
H ₃	Penalaran etis memoderasi hubungan antara <i>internal control</i> terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa.	Hipotesis diterima
H ₄	Penalaran etis memoderasi hubungan antara penerapan SOP terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa	Hipotesis diterima

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 20 2018.

Penelitian ini mengungkapkan tentang pengaruh *internal control*, penerapan *standar operating procedure*, terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa dengan penalaran etis sebagai variabel moderating dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai masing-masing variabel akan diuraikan dengan paparan sebagai berikut:

1. Pengaruh internal control terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa

Hipotesis pertama (H₁) menyatakan bahwa *internal control* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa *internal control* memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,308 dengan tingkat signifikan 0,044. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 Artinya dapat disimpulkan bahwa H₁ berhasil didukung, sehingga H₁ diterima.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *internal control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik *internal control* yang diterapkan instansi maka pencegahan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa akan semakin baik. Dengan adanya pengendalian internal maka pemeriksaan fisik dan proses pengadaan barang dapat dilakukan secara terus-menerus agar tidak terjadi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian yang dilakukan Meliany *et al.* (2012), Fauwzi (2011), Thoyibatun (2012), Rahmawati (2012) juga menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mampu untuk mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun kontradiksi dengan yang fenomena yang ditampilkan dalam latar belakang yang menunjukkan bahwa terjadi tindak kecurangan, yang merugikan hingga Rp 200 juta, hal ini terjadi dimungkinkan karena dari pihak UIN Alauddin terus mengupayakan pencegahan kecurangan dengan mengoptimalkan sistem pengendalian, hal ini ditandai dengan melaksanakan sosialisasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran tim TP4D Kejaksaan tinggi sul-sel. Dengan kehadiran TP4D di UIN, yang dengan pendampingan dan pengawalan hukumnya maka kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di UIN dapat berlangsung lebih baik.

TP4D ini lahir karena adanya instruksi presiden No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Melihat adanya kegalauan para pengelola anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang kuatir akan dampak hukum pada kegiatan yang mereka laksanakan, menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran negara. Karena itu TP4D hadir untuk membantu menghilangkan kegalauan tersebut dalam bentuk pendampingan dan pengawalan hukum (Pustipad).

Sesuai peran TP4D untuk melakukan pendampingan dan pengawalan hukum, TP4D membantu pimpinan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4-58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

2. Pengaruh penerapan SOP terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa

Hipotesis ketiga (H_2) menyatakan bahwa penerapan SOP berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa SOP memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,691 dengan tingkat

signifikan 0,005. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa H_2 berhasil didukung, sehingga H_2 diterima.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa SOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik SOP yang diterapkan instansi maka pencegahan terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa akan semakin baik. Pengaruh prosedur atau SOP yang signifikan pada pengendalian pengadaan barang/jasa menunjukkan bahwa panitia dan semua yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa sudah memahami pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan, sosialisasi, dan kajian mengenai prosedur yang berlaku. Dengan adanya pemahaman mengenai prosedur atau SOP pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku maka kecenderungan kecurangan mampu untuk dicegah.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Thai (2001) dalam Jatiningtyas (2011) yang menyatakan bahwa ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan Mustafa (2013) dalam Yanavia (2014) juga menjelaskan bahwa jika pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku maka tindak *fraud* dapat diminimalisir atau bahkan tidak mungkin terjadi, dan sebaliknya. Hal ini terjadi dimungkinkan karena UIN Alauddin aktif mengikuti seminar dan sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa, seperti pegawai UIN

Alauddin Makassar mengikuti seminar 4th Indonesia Procurement Forum dan Expo 2018 (4th IPEE 2018). Menurut Ismi Sabariah Pejabat Pengadaan Jasa dan Barang UIN Alauddin mengatakan, kegiatan IPFE sangat penting bagi insan Pengadaan lantaran seminar yang sangat menarik dengan membahas isu-isu terbaru sesuai dengan Aturan Pengadaan terbaru Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (Pustipad).

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini, adalah pembaharuan dari Perpres 54 Tahun 2010 yang membahas tentang aturan dan standar atau acuan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa seharusnya dilaksanakan. Dengan aktif mengikuti seminar dan sosialisasi seperti ini, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa akan semakin paham tentang prosedur pengadaan barang dan jasa sehingga proses pengadaan barang dan jasa tersebut akan berjalan semakin maksimal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Ardi (2008) yang menunjukkan bahwa pengaruh SOP tidak signifikan pada pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada pemerintah kota Surabaya, hal ini disebabkan karena panitia belum memahami prosedur yang berlaku.

3. Pengaruh internal control terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa dengan penalaran etis sebagai variabel moderating.

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa penalaran etis mampu memoderasi *internal control* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel moderating M3 (CARTA) memiliki

nilai koefisien p ositif sebesar 3,168 dengan tingkat signifikan 0,023. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa H_3 berhasil didukung, sehingga H_3 diterima.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penalaran etis mampu memoderasi pengaruh *internal control* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi level penalaran etis seseorang dengan mempertimbangkan pengendalian internal maka akan cenderung untuk menghindari perilaku penyimpangan seperti kecurangan. Hal ini konsisten dengan penilitan yang dilakukan oleh Rahmat (2018) Individu dengan level moralitas rendah lebih cenderung melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak ada elemen pengendalian internal dibandingkan dengan kondisi ada elemen pengendalian internal. Dengan kata lain elemen pengendalian internal dapat menjadi lebih efektif untuk mampu mengurangi kecenderungan individu dengan dibarengi dengan penalaran etis yang baik oleh panitia yang menjalankan untuk menentukan perilaku etisnya.

Dalam pandangan Islam, pengendalian paling tidak terbagi menjadi dua hal yaitu dari dalam dan dari luar diri sendiri (Hafidhuddin dkk 2003:156-157). Untuk menghindari suatu tindak kecurangan, selain patuh dengan aturan yang berlaku sebagai kontrol dari luar diri namun penting juga kontrol dari dalam diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya makai ia akan bertindak hati-hati Ia mengimani

bahwa apapun yang dilakukannya pasti disaksikan oleh Allah SWT. Seperti dalam Q.S Al-Mujadilah/ 58:7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

4. Pengaruh penerapan SOP terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa dengan penalaran etis sebagai variabel moderating.

Hipotesis keempat (H₄) menyatakan bahwa penalaran etis mampu memoderasi *internal control* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel moderating M3 (CARTA) memiliki nilai koefisien positif sebesar 2,437 dengan tingkat signifikan 0,043. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa H₄ berhasil didukung, sehingga H₄ diterima. Berdasarkan nilai signifikansi maka penalaran etis dapat dikatakan sebagai *Quasi moderasi*. *Quasi moderasi* merupakan variabel yang berfungsi sebagai variabel predictor (independent) dan sekaligus juga berinteraksi dengan

variabel predictor lainnya (X) (Ghozali, 2013). Jadi, dalam penelitian ini variabel penalaran etis dapat dikatakan sebagai variabel yang dapat memoderasi pengaruh SOP terhadap pencegahan *fraud* namun sekaligus juga dapat berfungsi sebagai variabel yang secara langsung mempengaruhi pencegahan *fraud*.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penalaran etis mampu memoderasi pengaruh penerapan SOP terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan semakin baik penalaran etis individu maka akan mampu untuk menutupi kemungkinan kelemahan-kelemahan dari standar atau prosedur yang telah ditetapkan seperti ketika adanya konflik kepentingan yang merayap masuk. Ketika ada hasutan dari pihak luar untuk bersekongkol untuk melakukan tindak kecurangan seperti mengatur pemenang tender, namun dengan penalaran etis yang baik maka pihak yang terkait akan mampu menyelesaikan dilema etiknya dengan baik, dengan tetap berperilaku etis dengan tidak menuruti hasutan tersebut. Kata lain penalaran etis mampu menguatkan pengaruh SOP terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu *internal control* dan penerapan SOP terhadap variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dan adanya interaksi variabel moderasi yaitu penalaran etis

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa *internal control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap yaitu pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan *internal control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa terbukti atau diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *internal control* yang diterapkan dalam suatu instansi maka semakin baik pula pencegahan terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan SOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap yaitu pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan penerapan SOP pengaruh positif dan signifikan terhadap yaitu pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa terbukti atau diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SOP dalam

suatu intansi para pegawai maka semakin baik pula pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

3. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa interaksi penalaran etis dan *internal control* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis ketiga (H₃) terbukti atau diterima.
4. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa interaksi penalaran etis dan penerapan SOP berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis keempat (H₄) terbukti atau diterima.

B. Saran

1. Bagi para *stakeholder* dan semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa untuk tetap menjaga integritas, kepercayaan dan etika yang baik agar terciptanya pengadaan barang dan jasa yang bersih dari tindak kecurangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian yang telah dilakukan, misalnya dengan meneliti variabel lain selain *internal control* dan SOP yang memiliki peran terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data,

sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak obyektif dalam mengisi kuesioner.

C. Keterbatasan Penelitian.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga besar kemungkinan adanya kelemahan yang ditemui seperti responden yang menjawab asal-asalan, tidak serius, maupun adanya pernyataan yang kurang dipahami oleh responden.
2. Responden yang dijadikan sampel masih kurang.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusyani, Ni Kadek Siska, Edy, Sujana. Wahyuni, Made Arie. 2016. Pengaruh *Whistleblowing System* Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *E-Journal SI Ak Ugm*. 6(3): 1-10
- Ahriati, Deni. Prayitno B. Erna W. 2015. Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal InFestasi*. 11(1):41-55
- Akbar, Ahmad. 2017. Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Peran *Whistleblower* Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Pengadaan Barang Dan Jasa. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar
- Alim, M Nizarul. 2008. Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi *Matching*. *Jurnal Akuntansu dan Keuangan*. 10 (2):69-72.
- Al-Qur'an. *Terjemahan* Departemen Agama.
- Amelia, Ira. Desmiyawati. N. Azlina. 2013. Pengaruh *Good Governance*, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Universitas Riau Pekanbaru.
- Amrizal. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi
- Astina, I Made. 2011. Tata Kelola Perguruan Tinggi Berbasis Dosen Dan Mahasiswa. Optimalisasi Peran Teknik Mesin Dalam Meningkatkan Ketahanan Energi. *Proseding. Seminar Nasional Teknik Mesin X*. 2-3 November.
- Asy'ari, Muhammad Asim. Prasetyono. Bambang Haryadi. 2013. Peran Dan Fungsi Satuan Pengawasan Intern Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Perguruan Tinggi X. *Jaffa*. 01(2):99 – 112
- Bachtiar, Wardi. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos. Hal 24
- Cipto, Hendra. 2016. Tersangkut Korupsi Mantan Bendahara Ditangkap. *Artikel*. Kompas.com

- COSO. 1992. *Internal Control – Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organization of The Tread Way Commission.
- Damayanti, Astrid dan Ardi hamzah. 2008. Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Sebagai Alat Pengendalian Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Infestasi*. *Jurnal Infestasi*. 4(2):125-144
- Dewi, G.A.K. 2016. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 01:77- 92
- Dewitasari, resa. 2009. Pengaruh Audit Intern dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Corporate Governance (GCG)*. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Fauwzi, Mohammad, 2011. Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
- Hafifhuddin, Didin. Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Gema Insani : Depok-Jawa Barat.
- Hall. James. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. PT. Salemba Empat : Jakarta.
- Harwida, Gita Arasy. 2013. Mengulik Peran Auditor Internal Dalam Melakukan Deteksi Dan Pencegahan *Fraud* Di Perguruan Tinggi. Universitas Trunojoyo Madura
- Haryatmoko. 2011. Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Herman, Lisa Amelia. 2013. Pengaruh Keadilan Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan. Artikel. [1\(1\)](#) : 1- 23
- Hermiyetti. 2010. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. *Artikel*. STEKPI Jakarta
- Intosai. 2009. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector. <http://www.idkk.gov.tr/Site/Dokumanlari/Yayinlar/INTOSAI.pdf>. Diakses 13 Agustus 2017.

- Jatiningtyas, Nurani. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi empat. Jakarta: Erlangga.
- Lestiyani, Tri Endah Karya dan Suranto. 2015. Analisis Kinerja Badan Layanan Umum Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*. 2(1) : 115-158.
- Liyanarachi, G dan C. Newdick. 2009. *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New-Zealand Evidence*. Journal of Business Ethics 89.
- Marwanto. 2007. Pengaruh Pemikiran Moral, Tingkat Idealisme, Tingkat Relativisme Dan *Locus Of Control* Terhadap Sensitivitas, Pertimbangan, Motivasi Dan Karakter Mahasiswa Akuntansi, *Tesis*. UNDIP..
- Meliany, Lia dan Erna, Hermawati. 2009. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Journal dan Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*. 3(1):1-10.
- Merawati, Luh Komang dan I nym K.A Mahaputra. 2017. Moralitas, Pengendalian Internal, dan Gender dalam Kecenderungan terjadinya Fraud. *Jurnal Akuntansi*, XXI:35-46.
- Mukhibad, Hasan. 2014. Dampak pendidikan etika bisnis dan pendidikan ekonomi syariah terhadap etika bisnis. *Jurnal dinamika Akuntansi*. Universitas Negeri Semarang.
- Nurharjanti, Nashirotn Nisa. 2013. Peranan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Mengurangi Fraud Di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif). *Syariah Paper Accounting*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang *Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern*

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah RI nomor 23 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Pope, J. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pramita, Y. D. 2014. Determinasi hubungan perspsi mahasiswa dan sivitas akademika tentang Pendidikan etika bisnis terhadap tingkat penalaran moral keputusan etis. *Jurnal Bisnis Ekonomi*. 12(2): 128-136
- Priyatno, Duwi. 2010. *Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS Dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Gaya Media : Yogyakarta
- Puspasari, Novita dan Suwardi, Eko. 2012. Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah.
- Pustipad UIN Alauddin. <http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/struktur-organisasi/>. (diakses pada 27 februari 2017)
- Rafinda, A. 2013. Kemampuan Prediksi Faktor Situasional dan Faktor Individual pada Perilaku Kecurangan Pelaporan. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*
- Rahmat, Armanto. 2018. Moralitas Dan Pengendalian Internal Dalam Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Rahmawati, Ardiana, Peni. 2012. Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rest, J. R. Narveas. 2000. *A Neo-Kohlbergian Approach To Morality Research*. Journal of Moral education vol 29.
- Sartono. 2006. Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi, edisi keempat, cetakan pertama, penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Saptapradipta, Patricia. 2015. Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*. Universitas Brawijaya Malang.

- Soejono, Karni. 2000. *Auditing Audits Khusus Dan Audit Forensik Dalam Praktik Edisi Pertama* . Jakarta FE UI.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tambunan, Rudi M. 2013. *Pedoman penyusunan Standard Operating Procedures (SOP), Edisi Kedua*, sMaiestas Publishging, Jakarta. Hal: 86
- Thoyibatun, Siti. 2012. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 16(2):245-260.
- Tjipto Atmoko. 2005. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Triani, Ni Nyoman Alit. Lintang Venusita dan Ibnu Qiza. 2014. Model *Good University* Dalam Mendeteksi *Fraud* Di Universitas Yang bersistem BLU. *3rd Economics & Business Research Festival*. 1767-1781
- Tuankotta, Theodorus M., 2010. Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. Jakarta:Salemba Empat. 431
- Tuankotta, T. M. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI)
- Theodorus.M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Seri Departemen akuntansi*. FE UI : Jakarta
- Tunggal, Amin Widjaja. 1995. *Struktur Pengendalian Intern*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Welton, R. E., J. R Davis dan M. LaGroune. 1994. *Promoting The Moral Development Of Accounting Graduate Students*. Accounting Education. International Journal 3
- Widjaja, Amin. 1992. *Pemeriksaan Kecurangan (fraud Auditing)*. Rineka Cipta : Jakarta
- Wilopo, 2006. Analisis factor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *SNA IX : Padang*.
- Wuryani, Eni. 2010. Pengendalian Intern Merupakan Bagian Integral Organizational Governance Pada Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi*. 2 (1) : 55-75
- Yanavia, Nike Lolita. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Propinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang

- Yuniarti R, R. Nelly Nur Apandi. 2012. Gejala Fraud Dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Studi Kualitatif*. 1-28
- Zainal, Rizki. 2013. Pengaruh efektivitas pengendalian intern, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). *Artikel*. 1-25
- Zaini, M., Carolina, A., & Sstiawan, A. R. 2015. Analisis pengaruh fraud diamond dan gone theory terhadap academic fraud (Studi kasus mahasiswa akuntansi Se-Madura). *Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.





LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth :

Responden

Di tempat

Bersama ini saya :

Nama : Dewi Puspitarani

NIM : 10800113120

Status : Mahasiswa Strata 1 (S-1), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi, UIN Alauddin Makassar

Sehubungan dengan penelitian skripsi program sarjana (S-1), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi, UIN Alauddin Makassar, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul **“Pengaruh IC dan SOP Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Penalaran Etis sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada UIN Alauddin Makassar)”**.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan.

Perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini bersifat dan bertujuan akademis/keilmuan semata dan hasil penelitian/laporan tidak disebarluaskan. Besar harapan saya Bapak/Ibu berkenan mengisi kuesioner ini dengan lengkap. Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Dewi Puspitarani

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
3. Umur :
4. Tingkat Pendidikan : ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
☐ D3 ☐ SMA ☐ Lain-lain
5. Jabatan :
6. Masa Kerja :

B. DAFTAR PERNYATAAN**1. Pengendalian Intern**

Mohon Bapak / Ibu memberikan tanda check list (✓) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/ibu. Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dengan pendapat yang diberikan:

SS : Sangat Sejuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

No.	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
A.	Lingkungan Pengendalian					
1	Aturan perilaku diterapkan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan pegawai					
2	Pimpinan menganalisis tugas yang dilaksanakan dan memberikan pertimbangan dan pengawasan					
3	Pelaksanaan kepemimpinan di lingkungan memiliki sikap positif, kondusif dan responsif terhadap pelaksanaan pelaporan program dan kegiatan					
4	Pimpinan tidak melakukan evaluasi struktur organisasi yang diperlukan secara rutin sebagai respon atas lingkungan yang berubah-ubah sesuai kebutuhan organisasi					
B.	Penilaian Resiko					
5	Risiko pelaksanaan program dan kegiatan diidentifikasi di tiap tingkatan					

6	Risiko yang ditimbulkan atas program dan kegiatan memiliki pengaruh dan menuntut perhatian pimpinan					
7	Pimpinan tidak melakukan analisis resiko secara lengkap dan menyeluruh tentang dampak pelaksanaan program dan kegiatan					
C. Aktifitas Pengendalian						
8	Pimpinan mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani resiko					
9	Pimpinan instansi tidak terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan					
10	Kegiatan pengendalian secara berkala dievaluasi untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dan berfungsi sebagaimana mestinya					
D. Informasi dan Komunikasi						
11	Informasi disediakan tepat waktu, memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat					
12	Tugas dibebankan pada pegawai dikomunikasikan dengan jelas dan dimengerti pengendalian internnya					
13	Pegawai tidak memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsung					
E. Pemantauan Pengendalian Intern						
14	Pimpinan mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					
15	Pimpinan menetapkan tindakan yang memadai untuk menindak lanjuti rekomendasi temuan dengan tepat					

2. Standard Operating Procedure

Mohon Bapak / Ibu memberikan tanda check list (✓) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/ibu.

No.	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
A.	Kemudahan dan kejelasan					
1	Penerapan SOP membuat karyawan lebih paham akan tugas					
2	Penerapan SOP tidak membuat kemudahan dalam bekerja dan menjalankan tugas					
B	Efektif dan Efisien					
7.	Penerapan SOP membuat SDM ditempatkan dalam posisi lebih terkait dengan kapasitasnya					
8.	Penerapan SOP mampu meminimalkan kesalahan kerja					
9.	Penerapan SOP tidak mengurangi beban pengawasan					
C	Dinamis					
6	SOP tidak ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuai kebutuhan					
7	Organisasi menyesuaikan isi SOP dengan pelaksanaan kerja					
D	Kepatuhan dan kepastian Hukum					
8	Penerapan SOP dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku					
9	SOP yang disusun tidak menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
10	SOP telah memiliki kepastian hukum untuk ditaati oleh pegawai dan melindungi pegawai jika terjadi tuntutan hukum.					

3. Penalaran Etis

Instruksi

Untuk jawaban nomor 1 sampai dengan 6 dihalaman berikut Bapak/Ibu diberikan kasus yang tidak terjadi sebenarnya. Berikan jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sukai.

Tiga bulan yang lalu Amir Mandala, AK, pindah dari dinas Perhubungan Ke Dinas Pekerjaan Umum. Tapi tetap sebagai staf akuntansi. Selama tiga tahun Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum diaudit oleh BPK. Hasil audit selalu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP). Selama tiga bulan bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belum memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Masih terdapat beberapa program yang tidak jalan, sehingga menunjukan bahwa pemerintah telah memenuhi batas anggaran tapi program pembangunan belum sepenuhnya berjalan. Mengetahui hal ini Amir Mandala, AK menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinannya. Namun pimpinannya meminta kepada Amir Mandala, AK untuk tidak mengubah proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang telah berjalan. Amir Mandala, AK diminta untuk menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran tersebut dengan tetap menunjukan bahwa Laporan Realisasi Anggaran telah digunakan dengan sebaiknya dan pembangunan-pembangunan telah dilakukan dengan semestinya. Pimpinan juga menyatakan akan memberikan bonus pada Amir Mandala, AK serta janji untuk dipromosikan. Amir Mandala, AK menyarankan agar pimpinannya mempertimbangkan untuk menunjukan gambaran kegiatan pembangunan yang telah tercapai, dan agar tidak terkena sanksi Undang-Undang, termasuk agar mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat, serta tidak merugikan para pegawai lainnya.

Nilailah keputusan pimpinan tempat Bapak/Ibu bekerja bila kondisi yang dihadapi oleh Amir Mandala, AK terjadi di instansi tempat Bapak/Ibu

No.	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1	Pimpinan instansi tetap menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu untuk kepentingannya					
2	Pimpinan instansi memberikan bonus pada staf akuntansinya karena telah patuh					
3	Pimpinan instansi tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu agar kinerjanya bagus dan terlihat baik					

4	Pimpinan instansi menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu, karena sudah menjadi kelaziman di instansi nya					
5	Pimpinan instansi menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti yang sebenarnya, karena pimpinan takut terkena sanksi Undang-Undang					
6	Pimpinan instansi menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti kondisi yang sebenarnya demi mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan pemerintahan					

4. Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Mohon Bapak / Ibu memberikan tanda check list (✓) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/ibu. Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dengan pendapat yang diberikan:

SL : Selalu

SR : Sering

KK : Kadang-kadang

JR : Jarang

TP : Tidak Pernah

PERNYATAAN	SL	SR	KK	JR	TP
Memperkuat Kerangka Hukum					
1. Menggunakan pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mencegah terjadinya korupsi.					
2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar pengadaan secara konsisten dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.					
Prosedur Transparan					
3. Melaksanakan prosedur tidak secara transparan dalam proses pengadaan barang.					
4. Melakukan seleksi terhadap pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.					

Membuka Dokumen Tender					
5. Membuka dokumen tender pada waktu yang telah ditetapkan.					
6. Membuka dokumen tender dihadapan semua pengikut tender di depan umum.					
Evaluasi Penawaran					
7. Evaluasi penawaran dalam proses pengadaan barang dilaksanakan secara benar dan adil.					
8. Ada pejabat yang melakukan evaluasi penawaran dengan ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.					
Melimpahkan Wewenang					
9. Melalui audit independen dalam menyingkapkan kesalahan atau manipulasi.					
10. Memberikan wewenang untuk menyetujui kontrak kepada pegawai/staff lain.					
Pemeriksaan dan Audit Independen					
11. Dalam kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun untuk menentukan pemenang, dari sejak penawaran diajukan.					
12. Audit independen tidak memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengadaan di perusahaan.					

LAMPIRAN 2
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

NO	INTERNAL CONTROL															TOTAL
	IC 1	IC 2	IC3	IC4	IC5	IC6	IC7	IC8	IC9	IC10	IC11	IC12	IC13	IC14	IC15	
C	4	5	3	2	4	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	51
2	5	5	5	4	5	4	5	4	1	4	4	5	4	5	5	65
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	5	5	5	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	68
5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	67
6	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	69
7	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	68
8	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	65
9	4	4	4	5	4	3	4	5	4	3	4	4	4	4	5	61
10	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	57
11	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	69
12	4	4	3	2	3	4	3	4	2	3	3	3	4	3	3	48
13	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	57
14	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	55
15	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62
16	4	5	4	2	4	4	3	4	3	4	4	4	2	4	4	55
17	2	5	3	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	67
18	5	5	4	2	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	64
19	5	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	67
20	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
21	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	68
22	5	5	4	5	4	4	2	5	2	5	4	4	4	5	4	62
23	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	2	5	4	60
24	5	4	4	4	2	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	59
25	4	5	5	3	4	4	3	4	3	4	5	4	3	4	5	60
26	2	1	2	2	4	4	2	4	3	4	2	1	4	2	3	40
27	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	71
28	4	4	3	2	3	4	3	4	2	3	3	3	4	3	3	48
29	5	4	4	4	4	4	3	3	4	5	5	4	2	4	4	59
30	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	57

31	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	69
32	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	72

NO	SOP										TOTAL
	SO1	SO2	SO3	SO4	SO5	SO6	SO7	SO8	SO9	SO10	
1	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	36
2	5	4	4	4	2	5	4	5	4	3	40
3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	48
5	5	4	5	4	4	2	4	5	4	4	41
6	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	48
7	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	40
8	5	4	5	4	4	2	4	5	2	4	39
9	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	45
10	5	4	4	4	3	3	4	5	3	3	38
11	5	4	5	5	3	3	3	4	4	4	40
12	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
13	5	4	4	4	3	3	4	5	3	3	38
14	5	4	4	3	3	4	4	4	2	4	37
15	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	39
16	5	2	4	4	4	3	4	4	3	4	37
17	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
18	5	5	4	4	2	4	3	5	4	4	40
19	5	5	4	5	2	4	5	5	5	5	45
20	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
21	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	43
22	5	3	5	5	5	2	4	5	1	5	40
23	5	4	5	5	2	4	2	4	4	4	39
24	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	36
25	4	4	4	5	3	4	4	2	4	4	38
26	3	3	4	4	2	2	1	4	2	1	26
27	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47
28	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
29	5	4	5	5	3	3	3	4	4	4	40
30	5	4	4	4	3	3	4	5	3	3	38
31	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	47
32	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	47

NO	PENALARAN ETIS						TOTAL
	PE1	PE2	PE3	PE4	PE5	PE6	
1	2	2	2	3	4	4	17
2	4	4	5	4	5	5	27
3	4	4	4	3	3	4	22
4	4	5	5	4	4	5	27
5	4	5	4	4	4	4	25
6	5	5	5	5	4	5	29
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	4	4	4	5	4	26
9	4	4	5	5	5	5	28
10	4	4	4	3	4	5	24
11	5	5	4	4	4	5	27
12	3	3	2	2	3	2	15
13	4	4	4	3	4	5	24
14	3	3	3	4	3	3	19
15	4	4	5	5	4	4	26
16	2	2	2	2	4	4	16
17	5	4	4	5	5	5	28
18	4	4	4	3	4	5	24
19	5	5	5	5	5	5	30
20	4	5	5	5	5	4	28
21	4	4	4	4	5	5	26
22	4	5	2	4	4	4	23
23	4	5	5	4	5	4	27
24	4	3	2	2	3	5	19
25	3	3	3	4	3	4	20
26	2	2	3	2	2	2	13
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	3	4	4	3	4	22
29	4	3	5	4	4	5	25
30	4	4	4	3	4	5	24
31	5	4	4	3	5	5	26
32	5	5	4	5	5	5	29

LAMPIRAN 3
STATISTIK DESKRIPTIF

A. Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Internal Control	32	40.00	72.00	61.3438	7.45139
SOP	32	26.00	48.00	40.6563	4.78984
Penalaran Etis	32	13.00	30.00	23.8750	4.31614
Pencegahan Fraud	32	37.00	60.00	52.6563	6.38855
Valid N (listwise)	32				

B. Statistik Deskriptif Pertanyaan

1. Internal Control

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15
N	Valid	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.4375	4.3750	4.1875	3.7188	4.0313	4.0625	3.6875	4.2188	3.7188	4.3125	4.1250	4.0938	3.9688	4.2813	4.1250
Sum		142.00	140.00	134.00	119.00	129.00	130.00	118.00	135.00	119.00	138.00	132.00	131.00	127.00	137.00	132.00

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	2	6.3	6.3	6.3
Ragu-Ragu	1	3.1	3.1	9.4
Valid Setuju	10	31.3	31.3	40.6
Sangat Setuju	19	59.4	59.4	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Ragu-Ragu	1	3.1	3.1	6.3
Valid Setuju	14	43.8	43.8	50.0
Sangat Setuju	16	50.0	50.0	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Ragu-Ragu	4	12.5	12.5	15.6
Valid Setuju	15	46.9	46.9	62.5
Sangat Setuju	12	37.5	37.5	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	6	18.8	18.8	18.8
Ragu-Ragu	4	12.5	12.5	31.3
Valid Setuju	15	46.9	46.9	78.1
Sangat Setuju	7	21.9	21.9	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	12.5
Valid Setuju	22	68.8	68.8	81.3
Sangat Setuju	6	18.8	18.8	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	9.4
	Setuju	24	75.0	75.0	84.4
	Sangat Setuju	5	15.6	15.6	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	9.4	9.4	9.4
	Ragu-Ragu	9	28.1	28.1	37.5
	Setuju	15	46.9	46.9	84.4
	Sangat Setuju	5	15.6	15.6	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	2	6.3	6.3	6.3
	Setuju	21	65.6	65.6	71.9
	Sangat Setuju	9	28.1	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

X1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
	Tidak Setuju	4	12.5	12.5	15.6
	Ragu-Ragu	6	18.8	18.8	34.4
	Setuju	13	40.6	40.6	75.0
	Sangat Setuju	8	25.0	25.0	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

X1.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	4	12.5	12.5	12.5
	Setuju	14	43.8	43.8	56.3
	Sangat Setuju	14	43.8	43.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

X1.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1

X1.13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	3	9.4	9.4	9.4
Ragu-Ragu	5	15.6	15.6	25.0
Valid Setuju	14	43.8	43.8	68.8
Sangat Setuju	10	31.3	31.3	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	12.5
Setuju	19	59.4	59.4	71.9
Sangat Setuju	9	28.1	28.1	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X1.14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Ragu-Ragu	2	6.3	6.3	9.4
Valid Setuju	16	50.0	50.0	59.4
Sangat Setuju	13	40.6	40.6	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X1.15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	4	12.5	12.5	12.5
Valid Setuju	20	62.5	62.5	75.0
Sangat Setuju	8	25.0	25.0	100.0
Total	32	100.0	100.0	

2. Standar Operating Procedure

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10
N	Valid	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.7188	4.0938	4.3438	4.3438	3.2813	3.6875	3.9063	4.4688	3.7813	4.0313
Sum		151.00	131.00	139.00	139.00	105.00	118.00	125.00	143.00	121.00	129.00

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	2	6.3	6.3	6.3
	Setuju	5	15.6	15.6	21.9
	Sangat Setuju	25	78.1	78.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
	Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	12.5
	Setuju	20	62.5	62.5	75.0
	Sangat Setuju	8	25.0	25.0	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	1	3.1	3.1	3.1
	Setuju	19	59.4	59.4	62.5
	Sangat Setuju	12	37.5	37.5	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	2	6.3	6.3	6.3
	Setuju	17	53.1	53.1	59.4
	Sangat Setuju	13	40.6	40.6	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	7	21.9	21.9	21.9
Ragu-Ragu	13	40.6	40.6	62.5
Valid Setuju	8	25.0	25.0	87.5
Sangat Setuju	4	12.5	12.5	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	4	12.5	12.5	12.5
Ragu-Ragu	8	25.0	25.0	37.5
Valid Setuju	14	43.8	43.8	81.3
Sangat Setuju	6	18.8	18.8	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X2.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	6.3
Ragu-Ragu	5	15.6	15.6	21.9
Valid Setuju	18	56.3	56.3	78.1
Sangat Setuju	7	21.9	21.9	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X2.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Valid Setuju	14	43.8	43.8	46.9
Sangat Setuju	17	53.1	53.1	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X2.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Tidak Setuju	3	9.4	9.4	12.5
Ragu-Ragu	4	12.5	12.5	25.0
Valid Setuju	18	56.3	56.3	81.3
Sangat Setuju	6	18.8	18.8	100.0
Total	32	100.0	100.0	

X2.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
	Ragu-Ragu	4	12.5	12.5	15.6
	Setuju	19	59.4	59.4	75.0
	Sangat Setuju	8	25.0	25.0	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

3. Penalaran Etis

Statistics

		M1	M2	M3	M4	M5	M6
N	Valid	32	32	32	32	32	32
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.9375	3.9063	3.8750	3.7500	4.0625	4.3438
Sum		126.00	125.00	124.00	120.00	130.00	139.00

M1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	9.4	9.4	9.4
	Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	18.8
	Setuju	19	59.4	59.4	78.1
	Sangat Setuju	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

M2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	9.4	9.4	9.4
	Ragu-Ragu	6	18.8	18.8	28.1
	Setuju	14	43.8	43.8	71.9
	Sangat Setuju	9	28.1	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

M3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	15.6	15.6	15.6
	Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	25.0
	Setuju	15	46.9	46.9	71.9
	Sangat Setuju	9	28.1	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

M4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	12.5	12.5	12.5
	Ragu-Ragu	7	21.9	21.9	34.4
	Setuju	14	43.8	43.8	78.1
	Sangat Setuju	7	21.9	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

M5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Ragu-Ragu	6	18.8	18.8	21.9
Valid Setuju	15	46.9	46.9	68.8
Sangat Setuju	10	31.3	31.3	100.0
Total	32	100.0	100.0	

M6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	2	6.3	6.3	6.3
Ragu-Ragu	1	3.1	3.1	9.4
Valid Setuju	13	40.6	40.6	50.0
Sangat Setuju	16	50.0	50.0	100.0
Total	32	100.0	100.0	

4. Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
N Valid	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4.6250	4.5938	4.5000	4.3125	4.4063	4.5313	4.5938	4.3125	4.1250	4.4063	4.1563	4.0938
Sum	148.00	147.00	144.00	138.00	141.00	145.00	147.00	138.00	132.00	141.00	133.00	131.00

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Ragu-Ragu	1	3.1	3.1	6.3
Valid Setuju	7	21.9	21.9	28.1
Sangat Setuju	23	71.9	71.9	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	1	3.1	3.1	3.1
Valid Setuju	11	34.4	34.4	37.5
Sangat Setuju	20	62.5	62.5	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Ragu-Ragu	2	6.3	6.3	9.4
Valid Setuju	8	25.0	25.0	34.4
Sangat Setuju	21	65.6	65.6	100.0

Total	32	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	6.3
Ragu-Ragu	1	3.1	3.1	9.4
Setuju	13	40.6	40.6	50.0
Sangat Setuju	16	50.0	50.0	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Ragu-Ragu	2	6.3	6.3	9.4
Setuju	12	37.5	37.5	46.9
Sangat Setuju	17	53.1	53.1	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	9.4
Setuju	9	28.1	28.1	37.5
Sangat Setuju	20	62.5	62.5	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Ragu-Ragu	1	3.1	3.1	3.1
Setuju	11	34.4	34.4	37.5
Sangat Setuju	20	62.5	62.5	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Ragu-Ragu	2	6.3	6.3	6.3
Setuju	18	56.3	56.3	62.5
Sangat Setuju	12	37.5	37.5	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Ragu-Ragu	6	18.8	18.8	21.9
Setuju	13	40.6	40.6	62.5
Sangat Setuju	12	37.5	37.5	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	6.3
Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	15.6
Setuju	6	18.8	18.8	34.4
Sangat Setuju	21	65.6	65.6	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	3.1	3.1	3.1
Tidak Setuju	4	12.5	12.5	15.6
Ragu-Ragu	3	9.4	9.4	25.0
Setuju	5	15.6	15.6	40.6
Sangat Setuju	19	59.4	59.4	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Y12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	2	6.3	6.3	6.3
Tidak Setuju	1	3.1	3.1	9.4
Ragu-Ragu	6	18.8	18.8	28.1
Setuju	6	18.8	18.8	46.9
Sangat Setuju	17	53.1	53.1	100.0
Total	32	100.0	100.0	

LAMPIRAN 4

UJI KUALITAS DATA

A. Uji Validitas

1. Internal control

		Correlations															
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	Internal Control
X1.1	Pearson Correlation	1	.496**	.658**	.298	-.085	-.067	.374*	-.074	.210	.312	.285	.435*	.059	.372*	.205	.501**
	Sig. (2-tailed)		.004	.000	.098	.642	.717	.035	.688	.248	.082	.114	.013	.748	.036	.261	.004
X1.2	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson Correlation	.496**	1	.583**	.203	.157	.173	.440*	.166	.121	.238	.466**	.583**	.099	.565**	.541**	.608**
X1.3	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.264	.390	.344	.012	.363	.511	.190	.007	.000	.591	.001	.001	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.4	Pearson Correlation	.658**	.583**	1	.553**	.180	.297	.523**	.126	.407*	.425*	.541**	.552**	.230	.585**	.560**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.325	.098	.002	.491	.021	.015	.001	.001	.206	.000	.001	.000
X1.5	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson Correlation	.298	.203	.553**	1	.209	.160	.447*	.397*	.508**	.492**	.540**	.547**	.497**	.672**	.369*	.753**
X1.6	Sig. (2-tailed)	.098	.264	.001		.252	.381	.010	.024	.003	.004	.001	.001	.004	.000	.038	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.7	Pearson Correlation	-.085	.157	.180	.209	1	.390*	.192	.161	.197	.337	.273	.344	.109	.460**	.317	.413*
	Sig. (2-tailed)	.642	.390	.325	.252		.028	.292	.379	.280	.059	.130	.054	.554	.008	.077	.019
X1.8	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson Correlation	-.067	.173	.297	.160	.390*	1	.121	.065	.269	.404*	.068	.360*	.347	.302	.289	.406*

X1.14	Pearson Correlation	.372*	.565**	.585**	.672**	.460**	.302	.609**	.243	.389*	.587**	.618**	.784**	.298	1	.572**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.036	.001	.000	.000	.008	.093	.000	.181	.028	.000	.000	.000	.098		.001	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.15	Pearson Correlation	.205	.541**	.560**	.369*	.317	.289	.509**	.299	.153	.287	.412*	.534**	.177	.572**	1	.630**
	Sig. (2-tailed)	.261	.001	.001	.038	.077	.109	.003	.096	.404	.112	.019	.002	.331	.001		.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Internal Control	Pearson Correlation	.501**	.608**	.771**	.753**	.413*	.406*	.713**	.373*	.643**	.691**	.671**	.824**	.540**	.849**	.630**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000	.019	.021	.000	.036	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Standar Operating Procedure.

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	SOP
X2.1	Pearson Correlation	1	.390*	.417*	.285	.320	.250	.445*	.514**	.116	.424*	.625**
	Sig. (2-tailed)		.027	.018	.113	.074	.168	.011	.003	.529	.016	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.2	Pearson Correlation	.390*	1	.255	.231	.056	.650**	.382*	.320	.656**	.393*	.704**
	Sig. (2-tailed)	.027		.159	.203	.759	.000	.031	.074	.000	.026	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.3	Pearson Correlation	.417*	.255	1	.513**	.426*	.028	.068	.339	.085	.335	.491**
	Sig. (2-tailed)	.018	.159		.003	.015	.880	.710	.058	.642	.061	.004
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.4	Pearson Correlation	.285	.231	.513**	1	.330	.256	.182	.067	.297	.369*	.535**
	Sig. (2-tailed)	.113	.203	.003		.065	.158	.319	.714	.098	.038	.002

	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson	.320	.056	.426*	.330	1	.029	.484**	.290	-.036	.480**	.549**
	Correlation											
X2.5	Sig. (2-tailed)	.074	.759	.015	.065		.873	.005	.108	.847	.005	.001
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson	.250	.650**	.028	.256	.029	1	.390*	.035	.704**	.392*	.648**
	Correlation											
X2.6	Sig. (2-tailed)	.168	.000	.880	.158	.873		.027	.847	.000	.026	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson	.445*	.382*	.068	.182	.484**	.390*	1	.345	.383*	.663**	.739**
	Correlation											
X2.7	Sig. (2-tailed)	.011	.031	.710	.319	.005	.027		.053	.030	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson	.514**	.320	.339	.067	.290	.035	.345	1	.014	.148	.453**
	Correlation											
X2.8	Sig. (2-tailed)	.003	.074	.058	.714	.108	.847	.053		.940	.419	.009
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson	.116	.656**	.085	.297	-.036	.704**	.383*	.014	1	.451**	.640**
	Correlation											
X2.9	Sig. (2-tailed)	.529	.000	.642	.098	.847	.000	.030	.940		.010	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson	.424*	.393*	.335	.369*	.480**	.392*	.663**	.148	.451**	1	.773**
	Correlation											
X2.10	Sig. (2-tailed)	.016	.026	.061	.038	.005	.026	.000	.419	.010		.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson	.625**	.704**	.491**	.535**	.549**	.648**	.739**	.453**	.640**	.773**	1
	Correlation											
SOP	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.002	.001	.000	.000	.009	.000	.000	
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Y9	Sig. (2-tailed)	.109	.004	.036	.114	.046	.032	.025		.325	.141	.016	.040	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson Correlation	.411*	.458**	.264	.239	.480**	.397*	.389*	.180	1	.206	-.020	-.044	.457**
Y10	Sig. (2-tailed)	.020	.008	.144	.187	.005	.025	.028	.325		.258	.914	.810	.009
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson Correlation	.310	.415*	.163	.375*	.494**	.575**	.187	.266	.206	1	.495**	.552**	.691**
Y11	Sig. (2-tailed)	.084	.018	.372	.035	.004	.001	.306	.141	.258		.004	.001	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson Correlation	-.005	.237	.225	.041	.104	.250	-.046	.421*	-.020	.495**	1	.760**	.541**
Y12	Sig. (2-tailed)	.980	.191	.215	.825	.572	.168	.804	.016	.914	.004		.000	.001
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson Correlation	.119	.250	.259	.117	.276	.376*	-.085	.366*	-.044	.552**	.760**	1	.601**
Pencegahan Fraud	Sig. (2-tailed)	.518	.167	.152	.523	.126	.034	.642	.040	.810	.001	.000		.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Pearson Correlation	.727**	.825**	.669**	.702**	.785**	.744**	.474**	.592**	.457**	.691**	.541**	.601**	1
Pencegahan Fraud	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.006	.000	.009	.000	.001	.000	
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Uji Reabilitas**3. Internal Control****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	15

4. Standar Operating Procedure**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	10

5. Penalaran Etis**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	6

6. Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.856	12

LAMPIRAN 5 UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.56130199
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.101
	Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		.744
Asymp. Sig. (2-tailed)		.638

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikoleniaritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Internal Control	.280	3.571
	SOP	.306	3.272
	Penalaran Etis	.303	3.303

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.305	2.971		.776	.444
	Internal Control	-.007	.080	-.029	-.082	.935
	SOP	-.009	.119	-.026	-.077	.939
	Penalaran Etis	.016	.132	.042	.123	.903

a. Dependent Variable: AbsUt

LAMPIRAN 6

UJI HIPOTESIS

1. Analisis Regresi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834 ^a	.696	.675	3.64464

a. Predictors: (Constant), OP, Internal Control

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	880.000	2	440.000	33.124	.000 ^b
	Residual	385.219	29	13.283		
	Total	1265.219	31			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), SOP, Internal Control

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.655	5.811		.973	.338
	Internal Control	.308	.146	.359	2.105	.044
	SOP	.691	.228	.518	3.038	.005

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

2. Analisis Regresi Nilai Mutlak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.863	2.36883

a. Predictors: (Constant), X2_M, X1_M, Zscore: SOP, Zscore: Penalaran Etis, Zscore: Internal Control

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1119.324	5	223.865	39.895	.000 ^b
	Residual	145.895	26	5.611		
	Total	1265.219	31			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), X2_M, X1_M, Zscore: SOP, Zscore: Penalaran Etis, Zscore: Internal Control

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49.699	1.014		48.995	.000
	Zscore: Internal Control	.584	.821	.091	.712	.483
	Zscore: SOP	.976	.794	.153	1.229	.230
	Zscore: Penalaran Etis	4.757	.790	.745	6.020	.000
	X1_M	3.168	1.309	.166	2.421	.023
	X2_M	2.437	1.144	.147	2.130	.043

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H. M. Yasin Limpo Nomor 36 Samata-Gowa ☎ (0411) 882682 (Fax. 882682)

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Tim Instruktur Deteksi Plagiat Turnitin telah menerima naskah Skripsi dengan identitas:

Nama Penulis : Dewi Puspitarani
NIM : 10800113120
Judul : Analisis internal Control dan penerapan standard operational procedure terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa dengan penalaran etis sebagai variabel moderating (studi empiris pada universitas islam negeri Alauddin Makassar)
Pembimbing I : Jamaluddin M., S.E., M.Si
Pembimbing II : Sumarlin, SE., M.Ak

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar **20%**. Sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka Skripsi ini dinyatakan **Layak/ Tidak layak*** untuk lanjut ke proses berikutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat **Ujian Hasil**.

Mengetahui

(Pembimbing)

Makassar, 15 Februari 2019

TIM Instruktur FEBI

Satriani S.I.P.

*Coret yang tidak perlu

*Catatan:

1-24% : "Tidak Terindikasi Plagiat"
25-49% : "Revisi Minor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
50-74% : "Revisi Mayor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
75-100%



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 586 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN Akuntansi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca :** Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Dewi Puspitarani**, Nim: **10800113120** tertanggal **17 Maret 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: **"Pengaruh Internal Control dan Penerapan Standard Operating Procedure terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan barang dan Jasa dengan Penalaran Etis Sebagai variabel Moderating (Studi Kasus pada Universitas Islam negeri Alauddin Makassar)"**
- Menimbang :**
- Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
 - Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempumakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 - Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI, No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Mengangkat/ Menunjuk saudara :
- Jamaluddin M., SE., M.Si.**, Sebagai Pembimbing Pertama.
 - Sumartini, SE., M.Ak.**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua :** Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 20 Maret 2017
Dekan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Remangpolong – Gowa Tlp. (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : *cyd* /EB.I/PP.00.9/2018

Samata, 19 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Undangan Seminar Proposal

A.n. Dewi Puspitarani/10800113120

Kepada Yth :

1. Jamaluddin Majid, SE., M.Si, Sebagai Pembimbing I
2. Sumarlin, SE., M.Ak. Sebagai Pembimbing II

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami mengundang bapak untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 25 Januari 2018

Waktu : 09.00 – 12.00

Judul Skripsi : Pengaruh internal Control dan penerapan Standard operating proccedure terhadap pencegahan kecurangan pengadaan Barang dan jasa dengan penalaran Etis sebagai variabel moderating (Studi emppris pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.)

Tempat : Ruang L. 206

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Yasalam
Dekan
[Signature]
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : **652** /EB.I/PP.00.9/01/2018
Lamp : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, 8 Januari 2018

Kepada,

Yth. Kepala UIN Alauddin Makassar

Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Dewi Puspitarani**
NIM : **10800113120**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Akuntansi**
Semester : **IX (Sembilan)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo**

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya "**Analisis internal control dan penerapan strandard operating procedure terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa dengan penalaran etis sebagai variabel moderating**"

Dengan Dosen pembimbing:
1. Jamaluddin M, SE., M.Si.
2. Sumarlin, SE., M.Ak.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa.**
Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1853/S.01/PTSP/2018
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Rektor Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 7069/EB.I/PP.00.9/02/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : DEWI PUSPITARANI
 Nomor Pokok : 10800113120
 Program Studi : Akuntansi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS INTERNAL CONTROL DAN PENERAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PENALARAN ETIS SEBAGAI MODERATING "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 s/d 31 Maret 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 28 Februari 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth.
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. *Portinggal*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar Telp. 0411-864928
Kampus I : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong – Gowa Telp. 0411-841879 Fax 8221400
Website : www.uin-alauddin.ac.id 841879 Fax 8221400

Nomor : B-542 /Un.06.1/PP.00.9/04/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Gowa, 18 April 2018

Yth;
1. Para Dekan Fakultas
2. Kepala LP2M
3. Kepala Biro AUPK
Dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 3523/S.01/PTSP/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan hormat disampaikan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : DEWI PUSPITARANI
Nomor Pokok : 10800113120
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa

Disetujui dan diberi izin untuk melaksanakan penelitian pada UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi :

“ANALISIS INTERNAL CONTROL DAN PENERAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PENALARAN ETIS SEBAGAI MODERATING”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 02 April sampai dengan 30 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, di mohon kesediaan Saudara kiranya berkenan memberi fasilitas dan informasi serta data yang akurat selama penelitian berlangsung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Rektor UIN Alauddin Makassar,
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 433 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Dewi Puspitarani, NIM : 10800113120
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Dewi Puspitarani, NIM: 10800113120** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor. 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No.85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor.93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing : Jamaluddin M. SE., M.SI.
Pembimbing II : Sumartini, SE., M.Ak.
Penguji I : Dr. Uince Bulutoding, SE., M.SI., Ak.
Penguji II : Muh. Akil Rahman, SE., ME.
Pelaksana : Kurniati Syukur, S.Ag.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 25 Februari 2019
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag./iv



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : 1008 /EB.1/PP.00.9/2/2019

Samata, 26 Februari 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Seminar Hasil

Kepada Yth
 Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
 Di-
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Dewi Puspitarani
 NIM : 10800113120
 Jurusan : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : Pengaruh Internal control dan penerapan standar operating procedure terhadap pencegahan kecurangan

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Februari 2018
 Waktu : 09.00 - 10.00 WITA
 Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
 NIP. 19581022 198703 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 587 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca :** Surat permohonan : Dewi Puspitarani
NIM : 10800113120
Tanggal : 13 Maret 2019
Mahasiswa Jurusan : AKUNTANSI
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "Pengaruh internal control dan SOP terhadap pencegahan kecurangan dengan penalaran elisa sebagai variabel moderating (Studi empiris pada Universitas Islam NeGeri Alauddin Makassar)"
- Menimbang :** 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat :** 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua :** Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji I : Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.
Penguji II : Muh. Akil Rahman, SE., ME.
Pembimbing I : Jamaluddin M, SE., M.Si.
Pembimbing II : Sumarlin, SE., M.Ak.
Pelaksana : Kurniati Syukur, S.Ag.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 19 Maret 2019

Dekan,



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 122/EB.1/PP.00.9/3/2019

Samata, 2 Maret 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian
Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Dewi Puspitarani
NIM : 10800113120
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : "Pengaruh internal control dan SOP terhadap pencegahan
kecurangan dengan penalaran etisa sebagai variabel
moderating (Studi empiris pada Universitas Islam NeGer
Alauddin Makassar)"

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2019

Waktu : 09.00 - 12.00 Wita

Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



DEWI PUSPITARANI atau disapa dengan Dewi lahir di Serang, 03 Januari 1994. Penulis tinggal di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari Ayahanda Mustapa dan Ibunda Maryani. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Citra Agung.

kemudian lanjut di SDN 13 Sumur Pecung Serang hingga duduk di kelas 4, lalu pindah ke SD Inpres Jongaya selama satu tahun dan pindah ke SDN13 Biru di Watampone hingga lulus pada tahun 2006, setelah lulus Sekolah Dasar penulis kemudian melanjutkan studi di SMPN 4 Watampone pada tahun 2006, kemudian melanjutkan studi di SMKN 1 Watampone pada tahun 2009 dan menyelesaikan studi pada tahun 2012 berselang satu tahun penulis melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di salah satu perguruan tinggi Negeri yang ada di Sulawesi Selatan yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar) dengan mengambil jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar penulis pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) pada Periode 2013-2014. Pernah menjadi bagian dari Kandang Seni Tirai Bambu (KSTB) Akuntansi.